



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2018-2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG**

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG**



**KOTA PANGKALPINANG
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka dilakukan Penggabungan antara Instansi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Kebersihan, khususnya pada bidang kebersihan menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Pangkalpinang merupakan dokumen yang memuat pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup untuk periode Tahun 2018-2023. Dokumen ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Dokumen Renstra disusun dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal terkait kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup, isu lingkungan hidup strategis yang berkembang, untuk kemudian dirumuskan berwujud Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, dan Strategi serta Arah kebijakan yang diambil dalam mengatasi tantangan yang ada.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak sehingga Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang berujung pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang,



Endang Supriyadi, ST., MT.
Pembina Tingkat I
Nip. 19760612 200003 1 003

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan RENSTRA Perangkat Daerah	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	III-3
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis.....	III-7
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-12
BAB IV VISI,MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi.....	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.

Seiring berjalannya waktu, setelah dua tahun RPJMD Kota Pangkalpinang, telah terjadi beberapa hal yaitu :

1. Terjadinya perubahan mendasar karena pandemi Corona atau COVID-19. yang berpengaruh terhadap perekonomian, kinerja keuangan dan kinerja pemerintahan sehingga prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang sebagai pedoman penyusunan RKPD harus disesuaikan.

2. Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK, telah terbentuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dan belum terakomodir di dalam penyusunan RPJMD tahun 2018 – 2023.
3. Target indikator sasaran yang ditetapkan sampai tahun 2023 perlu disesuaikan terkait adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan pembangunan khususnya bidang perekonomian.
4. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menerapkan Permendagri tersebut.

Beberapa hal tersebut diatas menjadi Faktor dilakukannya Perubahan RPJMD dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Dan untuk menyikapi perubahan RPJMD, agar Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang, maka disusunlah Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup kota Pangkalpinang dan juga merupakan upaya penyesuaian dengan dinamika pembangunan urusan lingkungan hidup yang terjadi.

Perubahan Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (stakeholders) dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja untuk pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup hingga tahun 2023 mendatang.

Renstra Perubahan yang disusun tetap mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang disusun setiap tahun untuk kurun waktu tahun 2021-2023. Selain itu Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini akan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 dilakukan berdasarkan pada Beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tk.I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua

- kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 -2024.
- u. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Non Alam;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- w. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- x. Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- y. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- z. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
- aa. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

- bb. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
- cc. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
- dd. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 04) ;
- ee. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15) ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan lingkungan hidup selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Berisi pedoman transisi kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

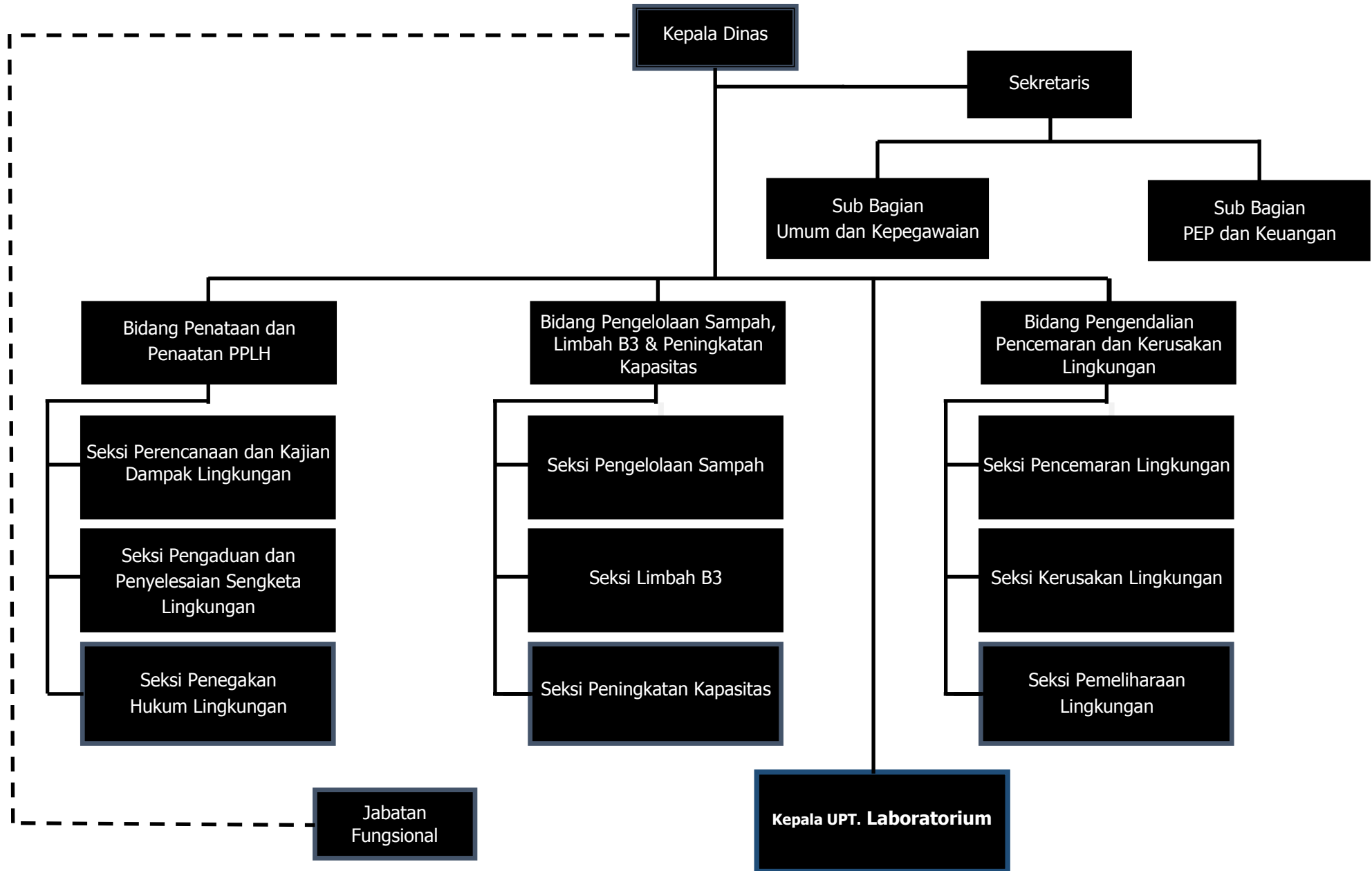
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Penataan dan Penekatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
 1. Seksi pengelolaan sampah
 2. Seksi Limbah B3
 3. Seksi peningkatan kapasitas
- e. Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Seksi pencemaran Lingkungan
 2. Seksi kerusakan Lingkungan
 3. Seksi Pemeiharaan Lingkungan Hidup
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, Yaitu :
 1. UPT. Laboratorium Lingkungan



2.4.2 Uraian Tugas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup ;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Lingkungan Hidup;
4. Penetapan rencana kerja dinas Lingkungan Hidup menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Lingkungan Hidup;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Lingkungan Hidup di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan tugas dan Pemberian Pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Penyusunan rencana Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan Organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH

Bidang penataan dan pentaatan PPLH mempunyai tugas :

Tugas Pokok : Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penataan dan Pentaatan PPLH kepada seluruh unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang penataan dan pentaatan PPLH menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Penyusunan Dokumen, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion, Penyusunan NSDA dan LH;
- g. Penyusunan, Indeks Kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah;
- h. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- i. Penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- j. Fasilitasi pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- k. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, Penilaian terhadap Dokumen, Penyusunan tim kajian Dokumen Lingkungan hidup yang transparan (Komisi penilai, tim pakar dan Konsultan) (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- l. Pelaksanaan proses izin lingkungan, Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitasi penerimaan penelaahan dan verifikasi, rekomendasi bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan tindak lanjut pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- n. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- q. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- s. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- t. Pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan perkara atas pelanggaran perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- u. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- 28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kota;
- bb. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kota;
- cc. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- dd. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

- ee. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ff. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- ii. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- jj. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- kk. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ll. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- qq. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- rr. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ss. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- tt. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

- uu. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- vv. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ww. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- xx. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- yy. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- zz. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- aaa. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

e. UPTD Laboratorium

UPTD Laboratorium Lingkungan diatur oleh Perwako No. 56 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Pada unsur pelaksana teknis kota pangkalpinang.

UPTD Laboratorium mempunyai tugas :

Tugas Pokok : melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dibidang Laboratorium Lingkungan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Laboratorium Lingkungan;
- b. Pelaksanaan operasional kegiatan Laboratorium Lingkungan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan, penyiapan bahan untuk melakukan pengujian hasil limbah yang berhubungan dengan kehidupan, pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada pelaku usaha tentang limbah usaha;
- c. Setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris Dinas;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Lingkungan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2020 sebanyak 474 orang, terdiri dari 37 PNS (26 laki-laki dan 11 perempuan) dan 437 non PNS (287 laki-laki dan 150 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SLTA sejumlah 162 orang, Tidak Sekolah sejumlah 122 orang, SD sejumlah 78 orang, SMP sejumlah 54 orang, S1 sejumlah 49 orang, DIII sejumlah 6 orang, S2 sejumlah 2 orang dan DI sejumlah 1 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Tidak Sekolah	0	0	77	45	122
2	SD	3	0	54	21	78
3	SMP Sederajat	3	0	31	20	54
4	SMA Sederajat	6	2	107	47	162
5	D1	0	0	1	0	1
6	D3	1	2	2	1	6
7	S1	11	7	15	16	49
8	S2	2	0	0	0	2
	Jumlah	26	11	287	150	474

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 21 orang pada tahun 2020, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	5	0	5
2	Golongan II	7	2	9
3	Golongan III	12	9	21
4	Golongan IV	2	0	2
	Jumlah	26	11	37

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang meliputi gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, sarana dan prasarana persampahan, kendaraan operasional kantor dan kendaraan pengangkut sampah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020

NO.	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9 unit	Baik
2	Buldozer	4 unit	3 Baik 1 Kurang Baik
3	Clawler Excavator	1 unit	Baik
4	Dump Truck	23 unit	19 Baik 2 Kurang Baik 2 Rusak Berat
5	Alat Pengangkat Lain-lain	5 unit	Baik
6	Pick Up	3 unit	Baik
7	Container	1 unit	Rusak Berat
8	Floating Excavator Lain-lain	1 unit	Baik
9	Alat Penarik Lain-lain	2 unit	Baik
10	Sweeper Truck	1 unit	Baik
11	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5 unit	Baik
12	Mobil Dinas	4 unit	Baik
13	Kendaraan Bermotor Angkutan Berat	1 unit	Baik
14	Mobil Tinja	1 unit	Baik
15	Mobil Tangki	1 unit	Baik
16	Mobil Kebersihan	5 unit	Kurang Baik
17	Sepeda Motor	18 unit	17 Baik 1 Kurang Baik
18	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	56 unit	37 Baik 8 Kurang Baik 11 Rusak Berat
19	Gerobak Dorong	80 unit	74 Baik 4 Kurang Baik 2 Rusak Berat
20	Bak Motor Sampah	2 unit	Baik
21	Sepeda	73 unit	Baik
22	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	1 unit	Baik
23	Global Positioning System (GPS)	2 unit	Baik

24	Chain Saw	3 unit	Baik
25	Lemari Besi	40 unit	38 Baik 1 Kurang Baik 1 Rusak Berat
26	Rak Besi/Metal	2 unit	Baik
27	Filling Besi/Metal	24 unit	18 Baik 6 Kurang Baik
28	Brand Kas	2 unit	1 Baik 1 Kurang Baik
29	Lemari Kaca	17 unit	Baik
30	Lemari Kayu	1 unit	Kurang Baik
31	Rak Penyimpanan	1 unit	Baik
32	Alat Pengahcur Kertas	2 unit	Baik
33	Papan Nama Instansi	11 unit	9 Baik 2 Kurang Baik
34	Papan Pengumuman	8 unit	6 Baik 2 Kurang Baik
35	Papan Tulis	3 unit	Kurang Baik
36	Papan Absen	2 unit	Kurang Baik
37	White Board	4 unit	Baik
38	Peta	1 unit	Baik
39	Genset	4 unit	Baik
40	Mesin Pompa Air	7 unit	3 Baik 4 Kurang Baik
41	Mesin Gergaji	1 unit	Baik
42	Papan Data	1 unit	Baik
43	Hand Tractor	1 unit	Baik
44	Kursi Kayu/Rotan/Bumbu	9 unit	Kurang Baik
45	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1 unit	Kurang Baik
46	Meja Rapat	1 unit	Baik
47	Meja Reseption	1 unit	Baik
48	Kursi Rapat	26 unit	10 Baik 16 Kurang Baik
49	Kursi Tamu	3 unit	Baik
50	Kursi Putar	79	9 Baik 70 Kurang Baik
51	Sofa	1 unit	Baik
	Sofa Ruang Pimpinan	1 Unit	Baik
52	Kursi Plastik	8 unit	Kurang Baik
53	Kursi Kerja	18 unit	Baik
54	Geolistrik	1 unit	Baik

55	Mesin Potong Rumput	10 unit	Baik
56	Mesin Cuci	1 unit	Baik
57	AC Unit	28 unit	3 Baik 25 Kurang Baik
58	AC Split	19 unit	Baik
59	Kipas Angin	4 unit	Baik
60	AC	1 unit	Baik
61	Kompore Gas	1 unit	Baik
62	Televisi	3 unit	Baik
63	Sound System	1 unit	Baik
64	Dispenser	4 unit	2 Baik 2 Kurang Baik
65	Handy Cam	1 unit	Baik
66	Stabilizer	3 unit	Baik
67	Mesin Rumput	1 unit	Baik
68	Mesin Kompresor	1 unit	Baik
69	Alat Pemadam Portable	3 unit	2 Baik 1 Rusak Berat
70	P.c Unit/ Komputer PC	28 unit	20 Baik 7 Kurang Baik 1 Rusak Berat
71	Personal Komputer	1 unit	Baik
72	LapTop	9 unit	8 Baik 1 Kurang Baik
73	Note Book	7 unit	5 Baik 2 Kurang Baik
74	GPS	3 unit	Baik
75	Printer	27 unit	Baik
76	Flashdisk	13 unit	9 Baik 4 Kurang Baik
77	Scanner	1 unit	Baik
78	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1 unit	Kurang Baik
79	UPS	13 unit	Baik
80	Hardisk Eksternal	2 unit	Baik
81	Speaker Aktive Komputer	1 unit	Baik
82	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Baik
83	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 unit	Baik
84	Meja Kerja	145 unit	53 Baik 92 Kurang Baik
85	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	13 unit	Baik
86	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 unit	Baik
87	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2 unit	Baik

88	Camera + Attachment	3 unit	Baik
89	Proyektor + Attachment		1 Baik 1 Kurang Baik
90	Handy Cam	1 unit	Baik
91	Layar Proyektor	1 unit	Baik
92	Alat Studio dan Komunikasi Lain	3 unit	Baik
93	CCTV	1 unit	Baik
94	Camera Electronic	5 unit	Baik
95	Kompas	2 unit	Baik
96	Sound System	1 unit	Baik
97	Handy Talky	13 unit	12 Baik 1 Kurang Baik
98	Faximile	1 unit	Baik
99	Slide Projector (Lapangan)	1 unit	Baik
100	Pengeras Suara (TOA)	1 unit	Baik
101	Container Besi	25 unit	Baik
102	Container Besi dan Landasan	3 unit	Baik
103	Container dan Landasan	3 unit	Baik
104	Container Mini Bak Sampah	3 unit	Baik
105	Tempat Sampah Permanen	20 unit	8 Baik 12 Kurang Baik
106	Tempat Sampah Basah dan Kering	120 unit	Kurang Baik
107	Gangtungan Sampah	120 unit	Kurang Baik
108	Drum Tempat Pembuatan Kompos	72 unit	37 Baik 35 Kurang Baik
109	Drum Kompos	57 unit	37 Baik 20 Kurang Baik
110	Bak Sampah Basah dan Kering	9 unit	Kurang Baik
111	Bak Sampah Tertutup	13 unit	Kurang Baik
112	Kotak Komposter	1 unit	Kurang Baik
113	Tempat Kompos	35 unit	Kurang Baik
114	Bak Besi Pengolah Kompos	1 unit	Kurang Baik
115	Tempat Sampah Plastik Beroda	20 unit	Kurang Baik
116	Tong Sampah Organik dan Non Organik	61 unit	1 Baik 60 Kurang Baik
117	Tempat Sampah Basah dan Kering	2 unit	Kurang Baik
118	Tong Sampah	277 unit	77 Baik 200 Kurang Baik
119	Tempat Sampah Plastik HDPE	1 unit	Baik
120	Tempat Sampah di Pinggir Sungai	1 unit	Baik
121	Tempat Sampah Kertas	1 unit	Baik
122	Jaring Pengaman Sampah	1 unit	Kurang Baik

123	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 unit	Baik
124	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3 unit	Baik
125	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	3 unit	Baik
126	Bangunan Kamar Mandi	1 unit	Baik
127	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Semi Permanen	1 unit	Baik
128	Gedung Pos Jaga Permanen	4 unit	Baik
129	Gedung Garasi/Pool Permanen	3 unit	Baik
130	Konstruksi Pagar	6 unit	5 Baik 1 Kurang Baik
131	Pintu Pagar	1 unit	Baik
132	Pintu Gerbang	1 unit	Kurang Baik
133	Kamar Kecil/Toilet	1 unit	Baik
134	Bangunan Parkir	9 unit	8 Baik 1 Kurang Baik
135	Perkerasan Jalan	3 unit	Baik
136	Jalan Sell Lingkar TPA	9 unit	Baik
137	Taman	2 unit	Baik
138	Bangunan Pos Jaga	3 unit	Baik
139	Bangunan Produksi Pupuk Kompos	1 unit	Baik
140	Bangsai Mesin Kompos	1 unit	Baik
141	Bangsai Kompos	10 unit	9 Baik 1 Kurang Baik
142	Dinding Bak Sampah	2 unit	Baik
143	Folding Gate Gudang	1 unit	Baik
144	Bak Pengolahan	6 unit	Baik
145	Arde Tembaga	1 unit	Baik
146	Tempat Pencucian Mobil	2 unit	Baik
147	Tangki Air	6 unit	Baik
148	Bangunan Garasi dan Genset	1 unit	Baik
149	Gudang	2 unit	Baik
150	Sumor Bor	2 unit	Baik
151	Mesin Las Listrik	2 unit	Baik
152	Mesin Gerindra Tangan	1 unit	Baik
153	Mesin Bor Tangan	1 unit	Baik
154	Mesin Air	1 unit	Baik
155	Dongkrak Mekanik	1 unit	Baik
156	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-Lain	9 unit	7 Baik 2 Kurang Baik
157	Alat Pertanian dan Peternakan	5 unit	Baik
158	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	1 unit	Baik
159	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1 unit	Baik

160	Mesin Rumput	6 unit	Baik
161	Sound Lever Meter	1 unit	Baik
162	Papan Visul	55 unit	Baik
163	Mesin Kompos dan Mesin Proses Sampah	1 unit	Baik
164	Vertikal Bland	5 unit	Baik
165	Alat Kantor Rumah Tangga Lainnya	1 unit	Baik
166	Air Sample	1 unit	Baik
167	Dust Sample	1 unit	Baik
168	Multifuction Frobe	1 unit	Baik
169	Hot Plate	6 unit	Baik
170	Alat Dapur Lain-lain	1 unit	Baik
171	Handy Cam	1 unit	Baik
172	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3 unit	Kurang Baik
173	Alat Penyemprot Rumput	11 unit	Baik
174	Mesin Kompresor	1 unit	Baik
175	Personal Komputer	1 unit	Baik
176	Keyboard	6 unit	Baik
177	Mouse	9 unit	Baik
178	Conductivity Meter	1 unit	Baik
179	Beaker Gelas	125 unit	Baik
180	Blender	1 unit	Baik
181	Cawan Petri	6 unit	Baik
182	Automatic Burette	1 unit	Baik
183	PH Meter	1 unit	Baik
184	Volumetric Flask	30 unit	Baik
185	Neraca	1 unit	Baik
186	Corong pemisah	5 unit	Baik
187	Cence Meinizer Sleeve Shaker	4 unit	Baik
188	Centrifuge	1 unit	Baik
189	Oven	2 unit	Baik
190	Botol D.O	52 unit	Baik
191	Botol Aqua	10 unit	Baik
192	Labu Takar	35 unit	Baik
193	Penanggas	1 unit	Baik
194	Alat Destilasi Air	1 unit	Baik
195	Corong	3 unit	Baik
196	Cawan Proceline	6 unit	Baik
197	Bejana Kaca	1 unit	Baik
198	Lampu Spritus	1 unit	Baik
199	Pengaduk	1 unit	Baik
200	Standar Klem Burute	5 unit	Baik
201	Test Tube	22 unit	Baik

202	Stop Watch	4 unit	Baik
203	Erlenmeyer Plastik	91 unit	Baik
204	Watch Glas	1 unit	Baik
205	Desicator	2 unit	Baik
206	Refrigerator	1 unit	Baik
207	Binocular Microscope	1 unit	Baik
208	PH Meter	2 unit	Baik
209	Caps For Centrifuge Tube	2 unit	Baik
210	Automatic Absortion	2 unit	Baik
211	Turbidimeter	1 unit	Baik
212	Conductometer	1 unit	Baik
213	Buret/Peralatan Tirasi	12 unit	Baik
214	Salinity Conductivity/Temperatur	1 unit	Baik
215	Alat Lab Kimia Lain-lain	66 unit	Baik
216	Magnetic Strirer	2 unit	Baik
217	Stand Diluter/ Pipet	14 unit	Baik
218	Lemari Asem	1 unit	Baik
219	Digital Multimeter	1 unit	Baik
220	Mortas dan Pastle	2 unit	Baik
221	Exhaust Fan	7 unit	Baik
222	Filtration Unit	1 unit	Baik
223	Micropipette	3 unit	Baik
224	Rubber Moisture Tester	35 unit	Baik
225	UV-VIS Spectrophotometer	1 unit	Baik
226	Hot Plate Stirer	1 unit	Baik
227	Pipet Ukur	100 unit	Baik
228	Automatic Pipet Dispenser	4 unit	Baik
229	Botol Reagen	13 unit	Baik
230	Alat Laboratorium Lainnya	4 unit	Baik
231	Alat Laboratorium Penunjang	1 unit	Baik
232	Alat Ukur Lainnya.GPS.Teropong	2 unit	Baik
233	Tangga Hidrolik	1 unit	Baik
234	Tabung Centrifuge	2 unit	Baik
235	Heating Mantle	2 unit	Baik
236	Gelas Ukur	39 unit	Baik
237	Pipet Tetes	2 unit	Baik
238	Batu Timbangan	2 unit	Baik
239	Cawan Alumunium	4 unit	Baik
240	Tali/Benang	2 unit	Baik
241	Kompas	1 unit	Baik
242	Botal Spesimen	43 unit	Baik

243	Rangka Penjepit	6 unit	Baik
244	Mikroskop	1 unit	Baik
245	Rak Tabunga Reaksi	10 unit	Baik
246	Sekop	2 unit	Baik
247	Botol	43 unit	Baik
248	Pita Ukuran (Meteran)	6 unit	Baik
249	Thermo Analvzer	1 unit	Baik
250	Water Sampler	1 unit	Baik
251	Burette	1 unit	Baik
252	Beaker	2 unit	Baik
253	Funnel	30 unit	Baik
254	Safety Can	5 unit	Baik
255	Camera Scope	3 unit	Baik
256	Soil PH meter	1 unit	Baik
257	Pocket Altimeter	1 unit	Baik
258	DO Meter	1 unit	Baik
259	TOC Analvzer	1 unit	Baik
260	Ice Cam	5 unit	Baik
261	Palu	3 unit	Baik
262	Termometer Berskala	10 unit	Baik
263	Lemari Penyimpanan	5 unit	Baik
264	Agate Spatula	1 unit	Baik
265	Timbangan	2 unit	Baik
266	Mesin Pencacah Sampah Organik	1 Unit	Baik
267	Mesin Pencacah Plastik	1 Unit	Baik
268	Mesin Press Sampah	1 Unit	Baik
269	Instalasi Pengelolahan Air Limbah	1 Unit	Baik
270	BOD Incubator	1 unit	Baik
271	Peralatan Distilasi	2 unit	Baik
272	Bor Tanah	4 unit	Baik
273	Rak-rak Penyimpanan	6 unit	Baik
274	Needle Holder	2 unit	Baik
275	Auto Clape	1 unit	Baik
276	Forcep	5 unit	Baik
277	Spatula	13 unit	Baik
278	Clamp Apparatus	5 unit	Baik
279	Alat Keamanan Lainnya	3 unit	Baik
280	Kapak Mata Dua	4 unit	Baik
281	Pompa Punggung	4 unit	Baik
282	Fiber Tempat Sampah Beroda	20 unit	Kurang Baik
283	Fiber Tempat Sampah	1 unit	Kurang Baik
284	Fiber Tempat Sampah Organik	113 unit	Kurang Baik

285	Fiber Tempat Sampah dan Kering	340 unit	130 Baik 210 Kurang Baik
286	Kotak Kompos Takakura	247 unit	1 Baik 246 Kurang Baik
287	Jaring Pengaman Sampah	1 unit	Baik
288	Papan Nama Bank Sampah	1 unit	Kurang Baik
289	Bangunan Teralis Besi	5 unit	Baik
290	Bangunan Konopi	1 unit	Baik
291	Carport	1 unit	Baik
292	Pagar	1 unit	Baik
293	Lambang Kebakaran	1 unit	Baik
294	Landasan	3 unit	Baik
295	Penyulingan Air	3 unit	Baik
296	Bangunan Pintu Gerbang	1 unit	Baik
297	Rumah Jaga	2 unit	Baik
298	Bangunan Dapur	1 unit	Baik
299	Jalan Khusus	1 unit	Baik
300	Jalan Lingkungan/ Halaman	3 unit	Baik
301	Saluran Drainase	1 unit	Baik
302	Bangun Irigasi Pengolahan	1 unit	Baik
303	Krib Pengaman Talud/Pantai	1 unit	Baik
304	Bangunan Pelengkap Air Bersih dan Lain-lain	3 unit	Baik
305	Bangunan Air Lainnya	3 unit	Baik
306	Air Sumber/Mata Air Lain-lain	1 unit	Baik
307	Instalasi Listrik	5 unit	Baik
308	Instalasi Telepon	2 unit	Baik
309	Instalasi Gardu Listrik Induk	1 unit	Baik
310	Instalasi Gardu Listrik Lain-lain	1 unit	Baik
311	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1 unit	Baik
312	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1 unit	Baik
313	Instalasi Jaringan Pipa Gas Lain-lain	3 unit	Baik
314	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas	1 unit	Baik
315	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas	1 unit	Baik
316	Pembangunan Talud	1 unit	Baik
317	Tanaman Perkebunan Lain-lain	4 unit	Baik
318	Tanaman Holtikultura Lain-lain	4 unit	Baik

Sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang masih memerlukan penambahan terutama untuk sarana dan prasarana pengolahan

persampahan karena berdasarkan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan persampahan. Daftar kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan persampahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1
Daftar Kebutuhan Kendaraan Pengangkut Sampah

Tahun	Volume sampah (m3/hari)	Kendaraan Tersedia				
		Dump Truk	Arm Roll	Mobil Sweeping	Motor Roda 3	Kontainer
2019	532	23	4	2	39	14
2020	542	23	4	2	39	14
2021	556	23	4	2	0	15
2022	569	23	4	2	0	15
2023	569	23	4	2	0	15

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2020 salah satunya yaitu penanganan kebersihan di Kota Pangkalpinang seperti berikut ini :

Tabel. 2.4
Data Persampahan Kota Pangkalpinang

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perkiraan Produksi Sampah	39.409	46.691	55.952	65.926	66.023	61.233
Jumlah Sampah terangkut ke TPA	32.304	37.635	43.581	48.827	55.545	48.496
Jumlah Sampah yang diantar langsung ke TPA	212,681	259,44	304,16	303,812	246,74	204
Jumlah Terkelola	6.893	8.796	12.067	17.099	10.478	12.737
Jumlah Sampah tidak terangkut dan terkelola	212,681	259,44	304,16	303,812	246,74	349,002

Tabel. 2.5**Volume Timbunan Sampah dan Sampah Terangkut ke TPA Tahun 2015-2020**

TAHUN	PERKIRAAN PRODUKSI SAMPAH (M3/HARI)	VOLUME SAMPAH TERANGKUT TPA (M3/HARI)	PRESENTASE TERANGKUT
2015	359,9	295,01	82%
2016	426,4	343,7	81%
2017	510,98	398	78%
2018	518,55	420	92%
2019	587	499	93%
2020	612	565,37	92%

Semenjak DLH dibentuk tahun 2017 penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan yang dapat diselesaikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6**Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan**

Tahun	Target kasus yang masuk	Realisasi penyelesaian Kasus	Presentase
2017	5 kasus	3 kasus	60%
2018	5 kasus	6 kasus	120%
2019	5 kasus	1 kasus	20%
2020	5 kasus	1 kasus	20%

Pemantauan bahan perusak ozone yang dilakukan dalam identifikasi potensi penggunaan bahan perusak ozone skala kota yang rutin dilakukan ke pelaku usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7**Pemantauan Bahan Perusak Ozone Kota Pangkalpinang**

Tahun	Target pemantauan	Realisasi	Presentase
2017	20 perusahaan	20 perusahaan	100%
2018	20 perusahaan	18 perusahaan	90%

2019	20 perusahaan	20 perusahaan	100%
2020	30 perusahaan	0	0%

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup yang dilakukan dari tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.8

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Tahun	Target pemantauan	Realisasi	Presentase
2017	40 perusahaan	34 perusahaan	85%
2018	45 perusahaan	44 perusahaan	97%
2019	45 perusahaan	56 perusahaan	124%
2020	45 Perusahaan	43 Perusahaan	95%

Pemantauan kuliatas lingkungan yang dilakukan dalam rangka memantau kualitas lingkungan khususnya air di wilayah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9

Pemantauan kualitas lingkungan

Tahun	Target Titik Pantau	Realisasi	Presentase
2017	50 titik pantau	50 titik pantau	100%
2018	50 titik pantau	50 titik pantau	100%
2019	50 titik pantau	50 titik pantau	100%
2020	50 titik pantau	50 titik pantau	100%

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang baru dibentuk Tahun 2017 gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, sehingga kinerja dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang dapat ditampilkan hanya pada tahun 2017-2020 karena kinerja tahun sebelumnya ada pada dinas yang lama sehingga kesulitan dalam pengisian realisasi kerjanya dan realisasi anggaran. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Pangkalpinang

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKP tahun ke -						Realisasi Capaian tahun ke -						Rasio Capaian tahun ke -					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	80 %	Jumlah Data kualitas lingkungan berdasarkan status mutu	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	80 %	Jumlah perusahaan yang diawasi	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
		Identifikasi sumber pencemaran yang berasal dari industri	100 %	Jumlah sumber pencemaran yang berasal dari industri	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	80 %	Jumlah Data kualitas lingkungan berdasarkan status mutu	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Ling	80 %	Jumlah Data kualitas lingkungan berdasarkan status mutu	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	80 %	Jumlah Data kualitas lingkungan berdasarkan status mutu	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	80 %	Jumlah Data kualitas lingkungan berdasarkan status mutu	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	80 %	Jumlah Data kualitas lingkungan berdasarkan status mutu	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	80 %	Jumlah Data kualitas lingkungan berdasarkan status mutu	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan pemantauan bahan perusak ozon, Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain sumberdaya manusia yang minim.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 sd 2020

Program	Anggaran Pada Tahun Ke		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke		Rata -Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata -Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.182.545.500	746.438.598	1.001.090.548	697.984.109	84,66	93,51	1.555.764.799	1.350.082.603
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.200.000	111.000.000	114.194.194	96.134.800	45,10	86,61	308.700.000	162.261.594
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	142.275.000	153.350.000	132.625.000	151.275.000	93,22	98,65	218.950.000	208.262.500
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.728.500	27.000.000	32.278.500	26.720.000	98,63	98,96	46.228.500	45.638.500
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	66.650.000	30.000.000	39.660.000	9.919.000	59,50	33,06	81.650.000	44.619.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.667.000	21.500.000	35.127.000	16.837.300	98,49	78,31	46.417.000	43.545.650
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	9.705.000	22.938.700	9.239.100	91,75	95,20	29.852.500	27.558.250
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan	10.000.000	3.250.000	9.870.000	3.249.800	98,70	99,99	11.625.000	11.494.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	70.000.000	-	69.755.000	-	99,65	-	70.000.000	69.755.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	13.500.000	7.140.000	13.500.000	7.140.000	100,00	100,00	17.070.000	17.070.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	350.000.000	195.093.598	349.867.154	195.069.109	99,96	99,99	447.546.799	447.401.709
Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	183.525.000	188.400.000	181.275.000	182.400.000	98,77	96,82	277.725.000	272.475.000

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	724.360.750	353.681.500	655.281.650	253.541.660	90,46	71,69	901.201.500	782.052.480
Pengadaan Meubeler	25.000.000	30.000.000	21.872.000	19.250.000	87,49	64,17	40.000.000	31.497.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	314.989.550	25.000.000	310.034.000	24.917.500	98,43	99,67	327.489.550	322.492.750
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	309.371.200	298.681.500	250.789.650	209.374.160	81,06	70,10	458.711.950	355.476.730
Pemeliharaan Rumah Penjaga Kantor	75.000.000	-	72.586.000	-	96,78	-	75.000.000	72.586.000
Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000	-	43.500.000	-	87,00	-	0	43.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50.000.000	-	43.500.000	-	87,00	-		43.500.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	34.694.400	49.796.721	18.549.400	99,59	-	67.347.200	59.071.421
Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	4.694.400	49.796.721	4.694.400	99,59	100,00	52.347.200	52.143.921
Peningkatan Penerimaan PAD	-	30.000.000	-	13.855.000	-	46,18	15.000.000	6.927.500
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	18.900.000	12.900.000	17.749.450	11.911.850	93,91	-	25.350.000	23.705.375
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.150.000	2.350.000	3.150.000	2.311.500	100,00	-	4.325.000	4.305.750
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.150.000	2.350.000	3.149.850	2.339.350	100,00	99,55	4.325.000	4.319.525
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.150.000	2.350.000	3.150.000	2.340.200	100,00	99,58	4.325.000	4.320.100
Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	3.150.000	2.350.000	3.150.000	2.296.250	100,00	97,71	4.325.000	4.298.125
Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	3.150.000	3.500.000	1.999.600	2.624.550	63,48	74,99	4.900.000	3.311.875

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Penyusunan RENSTRA	3.150.000	-	3.150.000		100,00	-	3.150.000	3.150.000
Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	28.200.000	-	25.952.000	-	92,03	-	28.200.000	25.952.000
Peningkatan Penerimaan PAD	28.200.000	-	25.952.000	-	92,03	-	28.200.000	25.952.000
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19.186.113.937	16.781.826.155	16.318.393.126	15.372.838.734	85,05	-	27.577.027.015	24.004.812.493
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	638.048.587	169.900.000	310.000.000	169.536.500	48,59	99,79	722.998.587	394.768.250
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	12.897.021.200	13.084.431.378	12.254.536.730	12.203.630.160	95,02	93,27	19.439.236.889	18.356.351.810
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5.825.000	-	1.575.000		27,04	-	5.825.000	1.575.000
Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan (Operasional TPI)	98.652.000	-	86.787.000		87,97	-	98.652.000	86.787.000
Pengendalian Pencegahan Pencemaran Sampah Liar	30.756.000	-	30.752.500		99,99	-	30.756.000	30.752.500
Operasional TPA dan Sanitary Landfill	3.751.972.350	3.247.494.777	2.610.135.410	2.759.007.470	69,57	84,96	5.375.719.739	3.989.639.145
Penataan TPA	-	100.000.000	-	99.937.104	-	99,94	50.000.000	49.968.552
Penyelenggaraan TPS3R Kawa Begawe dan TPS3R Berkah	-	30.000.000	-	26.448.500	-	88,16	15.000.000	13.224.250
Penyusunan Review DED TPA	-	150.000.000	-	114.279.000	-	76,19	75.000.000	57.139.500
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Persampahan	575.839.600	-	488.947.900		84,91	-	575.839.600	488.947.900
Pemeliharaan Kebersihan Perumahan Tampuk Pinang Pura	96.754.000	-	83.225.700		86,02	-	96.754.000	83.225.700

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Kerjasama Penanganan Kebersihan Kota	50.000.000	-	41.740.500		83,48	-	50.000.000	41.740.500
Sosialisasi Pemilihan dan Pengolahan Sampah Masyarakat	48.882.880	-	42.195.000		86,32	-	48.882.880	42.195.000
Sosialisasi Sadar Reduce Reuse Recycle 3R Bagi Siswa/Siswa	43.647.120	-	38.275.000		87,69	-	43.647.120	38.275.000
Pemeliharaan Kebersihan Perumahan RUSUNAWA	90.993.200	-	81.555.000		89,63	-	90.993.200	81.555.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	50.000.000	-	41.200.000		82,40	-	50.000.000	41.200.000
Pengadaan Alat Angkutan Dump Truck	426.479.000	-	-		-	-	426.479.000	-
Pengelolaan Sampah Serta Sarana Prasarana Pendukung	381.243.000	-	207.467.386		54,42	-	381.243.000	207.467.386
Program Penataan Lingkungan Hidup	-	1.535.112.688		1.421.364.426	-	-	767.556.344	710.682.213
Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura	-	75.000.000	-	49.631.000	-	66,17	37.500.000	24.815.500
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	-	19.601.149	-	13.794.500	-	70,38	9.800.575	6.897.250
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	432.973.513	-	430.145.060	-	99,35	216.486.757	215.072.530
Pemantauan Bahan Perusak Ozone	-	3.225.000	-	3.150.000	-	97,67	1.612.500	1.575.000
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Kerusakan Lingkungan	-	25.100.000	-	21.836.718	-	87,00	12.550.000	10.918.359
Akreditasi Laboratorium	-	44.475.000	-	30.488.000	-	68,55	22.237.500	15.244.000

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Penyelenggaraan Sekretariat Komisi AMDAL	-	50.100.000	-	50.006.500	-	99,81	25.050.000	25.003.250
Akselerasi Laboratorium	-	4.906.402	-	4.906.402	-	100,00	2.453.201	2.453.201
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	-	37.900.000	-	35.458.000	-	93,56	18.950.000	17.729.000
Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	-	200.000.000	-	162.612.000	-	81,31	100.000.000	81.306.000
Pengawasan Limbah B3	-	36.300.000	-	30.300.000	-	83,47	18.150.000	15.150.000
Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	19.851.000	-	19.851.000	-	100,00	9.925.500	9.925.500
Kaji Banding Laboratorium Terakreditasi	-	31.192.200	-	30.378.529	-	97,39	15.596.100	15.189.265
Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	-	26.299.000	-	26.243.000	-	99,79	13.149.500	13.121.500
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	4.687.500	-	3.787.500	-	80,80	2.343.750	1.893.750
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	-	7.558.400	-	7.558.400	-	100,00	3.779.200	3.779.200
Inventarisasi Data Base Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Pangkalpinang	-	41.994.251	-	36.295.200	-	86,43	20.997.126	18.147.600
Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan	-	458.600.473	-	451.574.937	-	98,47	229.300.237	225.787.469
Pengambilan Sampling Udara	-	3.807.800	-	3.807.800	-	100,00	1.903.900	1.903.900
Pengolaan dan Pengolahan Data Hasil Uji Kualitas Air dan Udara	-	11.541.000	-	9.539.880	-	82,66	5.770.500	4.769.940

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.372.596.000	-	1.113.052.097	-	-	-	1.372.596.000	1.113.052.097
Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura	87.830.000	-	62.697.738		71,39	-	87.830.000	62.697.738
Pemantauan Kualitas Lingkungan	403.264.000	-	397.165.213		98,49	-	403.264.000	397.165.213
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	50.000.000	-	40.024.000		80,05	-	50.000.000	40.024.000
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	40.000.000	-	39.651.300		99,13	-	40.000.000	39.651.300
Pengadaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan	90.059.000	-	89.412.000		99,28	-	90.059.000	89.412.000
Pembinaan Program Adiwiyata	50.000.000	-	36.490.000		72,98	-	50.000.000	36.490.000
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Kerusakan Lingkungan	100.865.000	-	83.968.485		83,25	-	100.865.000	83.968.485
Akreditasi Laboratorium	25.000.000	-	19.082.000		76,33	-	25.000.000	19.082.000
Sosialisasi Sumber Pencemaran yang Berasal dari Industri	50.000.000	-	20.644.000		41,29	-	50.000.000	20.644.000
Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	75.000.000	-	72.610.257		96,81	-	75.000.000	72.610.257
Penyelenggaraan Sekretariat Komisi Amdal	101.958.000	-	93.178.173		91,39	-	101.958.000	93.178.173
Akselerasi Laboratorium	14.305.000	-	13.212.800		92,36	-	14.305.000	13.212.800
Sosialisasi Peraturan Perundangan	70.000.000	-	43.415.250		62,02	-	70.000.000	43.415.250
Pengawasan Limbah B3	38.115.000	-	29.844.900		78,30	-	38.115.000	29.844.900
Pendapatan dan Pemetaan Penghasil Limbah B3	30.000.000	-	-		-	-	30.000.000	-

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Pembinaan Terhadap Sumber Pencemaran Pada Institusi dan Non Institusi	46.200.000	-	25.241.353		54,63	-	46.200.000	25.241.353
Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	50.000.000	-	29.759.628		59,52	-	50.000.000	29.759.628
Sosialisasi Dampak Kerusakan Lingkungan	50.000.000	-	16.655.000		33,31	-	50.000.000	16.655.000
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	632.000.000	-	449.820.798	-	-	-	632.000.000	1.432.094.016
Pemantauan Bahan Perusak Ozone	40.000.000	-	34.133.600	-	85,33	-	40.000.000	34.133.600
Program Kampung Iklim	42.000.000	-	36.734.400	-	87,46	-	42.000.000	36.734.400
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	100.000.000	-	73.480.714	-	73,48	-	100.000.000	73.480.714
Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)	200.000.000	-	123.266.700	-	61,63	-	200.000.000	123.266.700
Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	250.000.000	-	182.205.384	-	72,88	-	250.000.000	182.205.384
Pembuatan Lubang Biopori	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	513.227.650	-	491.136.609	-	95,70	-	513.227.650	491.136.609
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Alam	32.784.500	-	32.080.750	-	97,85	-	32.784.500	32.080.750
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	480.443.150	-	459.055.859	-	95,55	-	480.443.150	459.055.859

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

	23.757.943.837	19.464.653.341	20.165.772.999	17.776.190.179	84,88	91,33	33.490.270.508	29.053.868.089
--	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	----------------	----------------

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
Tahun Anggaran 2016 sd 2018

Program	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Persentase Realisasi Anggaran			Rata -Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata -Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	671.700.600	1.045.010.025	-	574.874.531	820.557.155	-	85,58	78,52	1.194.205.613	985.153.109
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	223.140.000	118.868.600	-	133.492.969	100.321.317	-	59,82	84,40	282.574.300	183.653.628
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	119.388.600	111.695.000	-	113.707.316	100.137.804	-	95,24	89,65	175.236.100	163.776.218
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	27.450.000	27.450.000	-	26.888.579	27.013.768	-	97,95	98,41	41.175.000	40.395.463
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	40.000.000	30.000.000	-	39.977.000	29.634.046	-	99,94	98,78	55.000.000	54.794.023
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	40.000.000	25.000.000	-	39.646.500	25.000.000	-	99,12	100,00	52.500.000	52.146.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	10.000.000	9.000.000	-	9.999.600	8.729.800	-	100,00	97,00	14.500.000	14.364.500
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan	-	5.000.000	3.000.000	-	4.999.000	2.845.000	-	99,98	94,83	6.500.000	6.421.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	-	50.000.000	-	-	49.250.000	-	-	98,50	25.000.000	24.625.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	-	189.272.000	352.879.063	-	189.162.988	348.104.580	-	99,94	98,65	365.711.532	363.215.278
Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	-	17.450.000	89.650.000	-	17.000.579	87.471.340	-	97,42	97,57	62.275.000	60.736.249

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Pemasangan Baru/Penambahan Daya Listrik	-	-	227.467.362	-	-	42.049.500	-	-	18,49	113.733.681	21.024.750
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	237.052.400	237.052.400	-	173.805.379	206.816.468	-	73,32	87,25	355.578.600	277.213.613
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	237.052.400	237.052.400	-	173.805.379	206.816.468	-	73,32	87,25	355.578.600	277.213.613
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	-	17.500.000	15.750.000	-	12.910.000	15.681.700	-	73,77	99,57	25.375.000	20.750.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3.500.000	3.150.000	-	3.500.000	3.139.000	-	100,00	99,65	5.075.000	5.069.500
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	3.500.000	3.150.000	-	2.500.000	3.139.800	-	71,43	99,68	5.075.000	4.069.900
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	3.500.000	3.150.000	-	3.500.000	3.133.300	-	100,00	99,47	5.075.000	5.066.650
Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	-	3.500.000	3.150.000	-	3.410.000	3.129.600	-	97,43	99,35	5.075.000	4.974.800
Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	-	3.500.000	3.150.000	-	-	3.140.000	-	-	99,68	5.075.000	1.570.000
Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	-	20.000.000	22.000.000	-	19.430.000	17.250.000	-	97,15	78,41	31.000.000	28.055.000
Optimalisasi Penerimaan PAD	-	20.000.000	22.000.000	-	19.430.000	17.250.000	-	97,15	78,41	31.000.000	28.055.000
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	14.434.033.600	14.243.565.675	-	12.982.340.008	13.148.122.050	-	89,94	92,31	21.555.816.438	19.556.401.033
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	-	355.668.750	905.655.625	-	339.414.000	881.910.000	-	95,43	97,38	808.496.563	780.369.000
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana	-	11.030.659.100	10.632.973.70	-	9.824.278.508	10.103.663.60	-	89,06	95,02	16.347.145.95	14.876.110.311

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

dan Sarana Persampahan			0			6				0	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	6.000.000	5.825.000	-	-	3.761.000	-	-	64,57	8.912.500	1.880.500
Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan (Operasional TPI)	-	98.500.000	86.012.000	-	74.037.458	76.377.536	-	75,16	88,80	141.506.000	112.226.226
Pengendalian Pencegahan Pencemaran Sampah Liar	-	27.960.000	30.756.000	-	27.955.500	17.633.900	-	99,98	57,33	43.338.000	36.772.450
Operasional TPA dan Sanitary Landfill	-	2.225.072.850	2.368.775.350	-	2.086.870.481	1.907.765.596	-	93,79	80,54	3.409.460.525	3.040.753.279
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Persampahan	-	332.102.900	-	-	328.309.000	-	-	98,86	-	332.102.900	328.309.000
Pemeliharaan Kebersihan Perumahan Tampuk Pinang Pura	-	80.570.000	77.342.000	-	71.550.066	70.058.372	-	88,80	90,58	119.241.000	106.579.252
Kerjasama Penanganan Kebersihan Kota	-	70.500.000	-	-	67.690.000	-	-	96,01	96,01	70.500.000	67.690.000
Sosialisasi Pemilihan dan Pengolahan Sampah Masyarakat	-	29.300.000	-	-	27.640.000	-	-	94,33	94,33	29.300.000	27.640.000
Sosialisasi Sadar Reduce Reuse Recycle 3R Bagi Siswa/Siswa	-	38.950.000	-	-	30.762.250	-	-	78,98	78,98	38.950.000	30.762.250
Pemeliharaan Kebersihan Perumahan RUSUNAWA	-	72.200.000	71.576.000	-	65.972.416	64.547.772	-	91,37	91,37	107.988.000	98.246.302
Pemberdayaan Masyarakat Tentang Sampah/Kompos dan Limbah Tinja	-	66.550.000	64.650.000	-	37.860.329	22.404.268	-	56,89	34,65	98.875.000	49.062.463
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	778.692.000	1.175.105.000	-	475.530.204	1.098.119.352	-	61,07	93,45	1.366.244.500	1.024.589.880
Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	298.047.000	348.844.200	-	291.105.644	339.975.981	-	97,67	97,46	472.469.100	461.093.635
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	-	100.000.000	75.000.000	-	94.079.860	67.710.100	-	94,08	90,28	137.500.000	127.934.910
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	-	1.955.800	-	-	1.955.800	-	-	100,00	977.900	977.900

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Pengadaan Alat Pemantaun Kualitas Lingkungan	-	283.145.000	300.000.000	-	-	294.744.700	-	-	98,25	433.145.000	147.372.350
Akselerasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	-	-	70.000.000	-	-	45.852.426	-	-	65,50	35.000.000	22.926.213
Sosialisasi Peraturan Perundangan	-	-	50.000.000	-	-	42.034.207	-	-	84,07	25.000.000	21.017.104
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Kerusakan Lingkungan	-	35.000.000	50.000.000	-	33.762.500	48.212.550	-	96,46	96,43	60.000.000	57.868.775
Akreditasi Laboratorium	-	12.500.000	25.000.000	-	7.562.200	20.836.300	-	60,50	83,35	25.000.000	17.980.350
Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	-	50.000.000	80.000.000	-	49.020.000	78.634.000	-	98,04	98,29	90.000.000	88.337.000
Penyelenggaraan Sekretariat Komisi Amdal	-	-	90.000.000	-	-	89.106.638	-	-	99,01	45.000.000	44.553.319
Akselerasi Laboratorium	-	-	14.305.000	-	-	8.508.200	-	-	59,48	7.152.500	4.254.100
Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	-	-	70.000.000	-	-	60.548.450	-	-	86,50	35.000.000	30.274.225
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	287.503.500	99.314.372	-	279.084.798	99.314.372	-	97,07	100,00	337.160.686	328.741.984
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	287.503.500	99.314.372	-	279.084.798	99.314.372	-	97,07	100,00	337.160.686	172.150.359
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	227.500.000	123.700.000	-	185.557.586	96.900.718	-	81,56	78,34	289.350.000	234.007.945
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	-	-	46.200.000	-	-	26.994.718	-	-	58,43	23.100.000	13.497.359
Pemantauan Bahan Perusak Ozone	-	37.500.000	37.500.000	-	36.839.300	35.600.000	-	98,24	94,93	56.250.000	54.639.300
Program Kampung Iklim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

	-	40.000.000	40.000.000	-	27.602.000	34.306.000	-	69,01	85,77	60.000.000	44.755.000
Pembuatan Lubang Biopori	-	150.000.000	-	-	121.116.286	-	-	80,74	-	150.000.000	121.116.286
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	32.496.500	338.590.428	-	32.166.500	201.586.088	-	98,98	59,54	201.791.714	132.959.544
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	225.614.828	-	-	201.586.088	-	-	89,35	112.807.414	100.793.044
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	112.975.600	-	-	-	-	-	-	56.487.800	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Hutan Kota	-	32.496.500	-	-	32.166.500	-	-	98,98	-	32.496.500	32.166.500
	-	16.706.478.600	17.350.087.900	-	14.735.699.006	15.704.347.903	-	88,20	90,51	25.381.522.550	22.587.872.958

realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yaitu perencanaan anggaran, waktu pelaksanaan kegiatan dan sumber daya manusia.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibanya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu meningkatkan pencemaran dari sumber domestic dan persampahan
4. Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan
5. Adanya pola pemilkiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Adanya isu perubahan iklim yang telah mendunia yang menekan kita untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan lebih baik
2. Adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk melakukan KLHS pada Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, serta kegiatan yang berdampak/beresiko terhadap lingkungan hidup
3. Adanya penghargaan dari pemerintah pusat terhadap kepala daerah yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan hidup terbaik (nirwasita tantra)

4. Adanya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup (PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, NIRWASITA TANTRA, SPM Bidang Lingkungan dsb.)
5. Adanya dukungan dan kerja sama dengan komunitas masyarakat pemerhati lingkungan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- 1) Meningkatnya timbulan sampah perkotaan
- 2) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengolahan persampahan
- 3) Belum adanya alat timbangan di TPA sehingga sulit menentukan volume sampah secara akurat dan tepat
- 4) Belum optimalnya kinerja TPS 3R
- 5) Masih rendahnya penanganan sampah dari sumbernya
- 6) Belum adanya penggunaan Teknologi untuk proses pengolahan sampah.

b. Permasalahan terkait Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup

- 1) Masih rendahnya pengusaha yang memahami ketentuan peraturan perundangan

c. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- 1) Masih kurang akurat dan update data mengenai luasan status kerusakan lahan kota Pangkalpinang

d. Permasalahan terkait UPT Laboratorium

- 1) Peningkatan kompetensi analis dengan adanya pelatihan-pelatihan tentang laboratorium

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mengarah pada pencapaian unsur visi: Nyaman. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-5 yaitu: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal dan sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup		1) Kurangnya SDM 2) Kualitas SDM yang ada masih kurang	1) Ketersediaan instrumen/ produk hukum/peraturan perundangan yang mengatur masalah lingkungan hidup
2	Tujuan Peningkatan kualitas infrastuktur dasar Pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal	Masih kurang akurat dan update data Lingkungan hidup	3) Kurangnya sarana dan prasarana 4) Masih minimnya data Lingkungan Hidup	2) Tersedianya UPT Laboratorium Lingkungan
3	Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan	Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup		

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam Mendukung "Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik bagi laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara ; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka tujuan KLHK yang selanjutnya dirinci ke dalam sasaran Strategis KLHK, Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat bagi laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB

- Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran ke-: I dan 4

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan	1) Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada makin kompleksnya permasalahan lingkungan (sampah, limbah dll) 2) Meningkatnya laju pembangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan 3) Meningkatnya fenomena perubahan iklim 4) Terbatasnya pendanaan APBD kota dalam pengelolaan lingkungan hidup	1) Belum tersedianya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Pangkalpinang 2) Minimnya SDM yang melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan 3) Rendahnya ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap regulasi Lingkungan Hidup 4) Penyesuaian reorganisasi dengan digabungkannya Dinas Kebersihan, dengan Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup	1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Isu Lingkungan menjadi isu Global yang menjadi perhatian internasional 3) Pengelolaan lingkungan yang integratif dengan penggabungan instansi DK menjadi Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah : Meningkatnya Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut diatas

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1) Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	1) Kurangnya sarana dan prasarana	1) Keterse-diaan instrumen/ produk hukum/per aturan perunda-ngan yang mengatur masalah lingkungan hidup
2.	Terjaganya kualitas udara di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2) Masih kurang akurat dan update data lingkungan hidup	2) Masih minimnya data Lingkungan Hidup	
3.	Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor limbah	3) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengolahan lingkungan hidup		
4.	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Sesuai Standar Pelayanan Publik			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, Kawasan Peruntukan RTH terdiri atas: RTH privat sebesar 10 % dan RTH publik

sebesar 10% kebutuhan minimum RTH Kota Pangkalpinang yang luas wilayahnya 118,408 km², yaitu 23,68 km², yang terdiri dari 11,84 km² RTH privat dan 11,84 km² RTH publik.

Berdasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Adapun rencana pengembangan RTH di wilayah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

(1) RTH privat

RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. RTH privat di Kota Pangkalpinang mencakup seluruh kawasan budi daya, terdiri dari:

a) RTH pekarangan rumah,

b) RTH perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, pada umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka, terdiri atas:

- jika KDB-nya 70%-90%, perlu menambahkan tanaman dalam pot;
- jika KDB-nya di atas 70%, memiliki minimal 2 pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm;
- penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di bawah 70%, berlaku persyaratan seperti pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

c) RTH taman atap bangunan (roof garden),

(2) RTH publik

RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH publik di Kota Pangkalpinang akan diarahkan sebesar kurang lebih 20,30 %, terdiri dari :

a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Kawasan ini adalah kawasan resapan air, yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan resapan air yang terdapat di Kota

Pangkalpinang akan dikembangkan di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang seluas \pm 958 ha.

b) Kawasan perlindungan setempat.

Kawasan perlindungan setempat bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Bentuk kawasan perlindungan setempat di Kota Pangkalpinang terdiri dari :

1. Kawasan sempadan pantai.

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai sempadan kawasan Pantai Tanjung Bunga adalah sebesar 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat, sedangkan untuk sempadan Pantai Pasir Padi ditetapkan dengan kriteria 20 meter dari jalan pantai ke arah darat.

2. Kawasan sempadan sungai.

Kawasan sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai serta kelestariannya.

rencana sempadan sungai di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

a) Sempadan Sungai Baturusa,

b) Sempadan Sungai Selindung adalah 50 meter;

c) Sempadan Sungai Rangkui, terdiri atas :

d) Sempadan Sungai Pedindang adalah 3 meter.

e) Sempadan Sungai Pasir Padi adalah 5 meter.

3. Kawasan sekitar kolong

4. Kawasan sekitar mata air

Kawasan mata air di wilayah Kota Pangkalpinang diidentifikasi terletak di Kelurahan Gabek Satu (Kecamatan Gabek), Kelurahan Air Kepala

Tujuh (Kecamatan Gerunggang) dan Kelurahan Kacang Pedang (Kecamatan Gerunggang).

c) RTH lainnya.

RTH lainnya yang akan dikembangkan di Kota Pangkalpinang terdiri atas :

1. Hutan kota.

kawasan hutan kota di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang seluas kurang lebih 163 ha.

2. Taman

Rencana pengembangan taman sebagai RTH lainnya di wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas taman kota dan taman lingkungan.

a) Taman kota.

Rencana pengembangan taman kota di wilayah Kota Pangkalpinang meliputi:

a. Alun-alun Taman Merdeka, Taman Wilhelmina dan Taman Mandara di Kecamatan Tamansari;

b. Taman Teluk Bayur dan Kebun Pemuda di Kecamatan Bukit Intan;

c. Taman Bukit Baru di Kecamatan Gerunggang.

b) Taman lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengembangkan sistem infrastruktur perkotaan	Minimnya Kajian RPPLH, KLHS dan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1. Minimnya SDM yang melakukan pengawasan, pengendalian dan Penegakan hukum	1. Adanya regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup 2. Adanya Renstra sebagai

			lingkungan terhadap pelaku usaha/kegiatan	pedoman pelaksanaan kegiatan
2	Mengembangkan sistem infrastruktur perkotaan			
3	Pengembangan kawasan strategis			

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Lingkungan Hidup memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan menyediakan sarana dan prasarana terkait penanganan persampahan perkotaan serta melakukan pengelolaan terhadap sampah perkotaan, pengelolaan dan proporsi limbah B3 yang di olah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan sampah terpadu (*reduce, reuse, and recycle/3R*), terjaminnya ketersediaan air dan meningkatkan kualitas air baku, dan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

Penelaahan KLHS dalam RPJMD Kota Pangkalpinang yang merupakan indikator lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku
2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani
3. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
4. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
5. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
6. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan

7. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
8. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
9. Kualitas air danau.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan
2. Belum optimalnya penanganan dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun
3. Minimnya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan
4. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemeliharaan kawasan lindung/RTH sehingga banyak terjadi Alih Fungsi Lahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan sampah
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Dengan adanya Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2021-2023 menjadi :

1. Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup		1. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	$\frac{\text{Capaian IKLH Tahun N yang tercapai}}{\text{Target IKLH RPJMD pada Tahun N}} \times 100\%$	%	103,99	102,54	101,14
2.		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	1. Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah sampah dan Limbah B3 yang ditangani}}{\text{Jumlah timbulan sampah dan Limbah B3}} \times 100\%$	%	86,5	88	89,5
3.			2. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	$\frac{\text{Evaluasi Pemenuhan Sanksi}}{\text{Jumlah Pengawasan}} \times 100\%$	%	15,87	22,93	30
4.			3. Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	$\frac{\text{Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100\%$	%	21,31	21,32	21,33

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang telah Terealisasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	2019		2020	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan sampah		1. Presentase penanganan sampah perkotaan	$\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100\%$	%	70	82,5	75	84,5
		a. Menurunnya volume sampah perkotaan	a. Presentase sampah yang terangkut ke TPA	$\frac{\text{Jumlah sampah yang diangkut ke TPA}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100\%$	%	60	76,3	65	74,8
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		2. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = IKA + IKU + IKTL	indeks	70	0	75	66,4508
		a. Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	$IP = \sqrt{\frac{(C_1/L_0)_{Baku\text{-}rendah}^2 + (C_1/L_0)_{Maksimum}^2}{2}}$	indeks	60	0	63	56,67
			b. Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	indeks	75	91,22	80	88,36
			c. Indeks Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (78 \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$	indeks	0,2	42,75	0,3	42,75

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan melalui :
 - a) Penanganan dan pengurangan sampah;
 - b) Pemantauan kualitas Lingkungan Hidup;
 - c) Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan/pencemaran lingkungan ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui :
 - a) penyusunan dan penerapan SPP, SOP, Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
 - b) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan Publik;

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup ;
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Khususnya Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak (RTHRA)
3. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Visi RPJMD: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD yang terkait : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup (Misi ke V)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar Pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup
			Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Khususnya Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak (RTHRA)
			Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2021-2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - c. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

B. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - b. Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
- d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

C. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

- 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - c. Pengelolaan Kebun Raya
 - d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - e. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
 - f. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - g. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

D. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

- 1. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

- 1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - c. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

F. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

G. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

H. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Pengelolaan Sampah
 - a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - c. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota
 - d. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - f. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota
2. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
 - a. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Meubeleur
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Bank Sampah

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Narkoba
3. Kegiatan Peningkatan dan Pendataan Objek Retribusi Persampahan
4. Kegiatan Peningkatan Penerimaan PAD

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Kegiatan Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal
6. Kegiatan Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup
7. Kegiatan Forum Perangkat Daerah
8. Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

E. Program Pengendalian Persampahan

1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
3. Kegiatan Pengendalian Pencegahan Pencemaran Sampah Liar
4. Kegiatan Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil
5. Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Persampahan
6. Kegiatan Kerjasama Penanganan Kebersihan Kota
7. Kegiatan Sosialisasi Pemilihan dan Pengolahan Sampah Masyarakat
8. Kegiatan Kebersihan Tingkat Kelurahan
9. Kegiatan Penataan TPA
10. Kegiatan Penyelenggaraan TPS3R Kawa Begawe dan TPS3R Berkah
11. Kegiatan Review DED TPA

F. Program Penataan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat
2. Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
3. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
4. Kegiatan Pemantauan Bahan perusak ozone
5. Kegiatan Pembinaan Program Adiwiyata

6. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan
7. Kegiatan Akreditasi laboratorium
8. Kegiatan Penyelenggaraan Sekretariat komisi AMDAL
9. Kegiatan Akselerasi Laboratorium
10. Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
11. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
12. Kegiatan Pengawasan Limbah B3
13. Kegiatan Pendapatan dan Pemetaan Penghasil Limbah B3
14. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup
15. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan
16. Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan
17. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
18. Kegiatan Kaji Ulang Dokumen Laboratorium
19. Kegiatan Kaji Banding Laboratorium Terakreditasi
20. Kegiatan Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup
21. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
22. Kegiatan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
23. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Pencemaran Institusi dan Non Institusi
24. Kegiatan Inventarisasi data base ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Pangkalpinang
25. Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)
26. Kegiatan Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan
27. Kegiatan Pengambilan Sampel Udara
28. Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data Hasil Uji Kualitas Air dan Udara

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
4. Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
8. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas
11. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Meubeleur
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Kegiatan Pemeliharaan Rumah Penjaga Kantor

C. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
3. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD
4. Kegiatan penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)
5. Kegiatan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal
6. Kegiatan penyusunan RENSTRA

E. Program Peningkatan Displin Aparatur

1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

F. Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya

1. Kegiatan Peningkatan Penerimaan PAD

G. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan
3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Kegiatan Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan (Operasional TPI)
5. Kegiatan Pengendalian Pencegahan Pencemaran Sampah Liar
6. Kegiatan Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil
7. Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Persampahan
8. Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Perumahan Tampuk Pinang Pura
9. Kegiatan Kerjasama Penanganan Kebersihan Kota
10. Kegiatan Sosialisasi Pemilihan dan Pengolahan Sampah Masyarakat
11. Kegiatan Sosialisasi sadar Reduce Reuse Recycle 3R bagi Siswa/siswi
12. Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Perumahan RUSUNAWA
13. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
14. Kegiatan Pengadaan Alat Angkut Dump Truck
15. Kegiatan Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung

H. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat
2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
3. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
4. Kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
5. Kegiatan Pengadaan Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan
6. Kegiatan Pembinaan Program Adiwiyata
7. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Kerusakan Lingkungan
8. Kegiatan Akreditasi Laboratorium
9. Kegiatan Sosialisasi Sumber Pencemaran Yang Berasal Dari Industri
10. Kegiatan Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup

11. Kegiatan Penyelenggaraan Sekretariat komisi AMDAL
12. Kegiatan Akselerasi Laboratorium
13. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan
14. Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Penghasil limbah B3
15. Kegiatan Pembinaan Terhadap Sumber Pencemaran Pada Institusi dan Non Institusi
16. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup
17. Kegiatan Sosialisasi Dampak Kerusakan Lingkungan

I. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Kegiatan Pemantauan Bahan perusak ozone
2. Kegiatan Program Kampung Iklim
3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup
5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

J. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana sumber daya alam
2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 dan 6.2 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
											Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7			9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup							Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	Capaian IKLH Tahun N yang tercapai DIBAGI Target IKLH RPJMD pada Tahun N DIKALI 100	%			103,99		102,54		101,14		101,14		
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan						Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	Jumlah sampah dan Limbah B3 yang ditangani DIBAGI Jumlah timbulan sampah dan Limbah B3 DIKALI 100	%	92,51	92,48	86,50		88,00		89,50		89,50		
							Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Evaluasi Pemenuhan Sanksi DIBAGI Jumlah Pengawasan DIKALI 100	%			15,87		22,93		30,00		30,00		
							Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) DIBAGI Luas Wilayah Perkotaan DIKALI 100	%			21,31		21,32		21,33		21,33		
		2	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%			100	5.901.155.087	100	6.887.775.687	100	6.887.774.800	100	19.676.705.574	

								Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DIKALI 100	%	100	100	100		100		100		100	
		2	1	0	2			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	%			100	18.053.900	100	20.395.000	100	20.395.000	100	58.843.900
		2	1	0	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra/Renja	Dokumen	1	1	3	1.738.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	6.438.000
		2	1	0	2	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	Dokumen	1	1	2	958.000	2	2.350.000	2	2.350.000	6	5.658.000
		2	1	0	2	0	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	1	15.357.900	1	15.695.000	1	15.695.000	3	46.747.900
		2	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%			100	4.747.528.063	100	5.207.171.157	100	5.207.171.200	100	15.161.870.420
		2	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang			46	4.192.328.063	46	4.644.799.957	46	4.644.800.000	46	13.481.928.020
		2	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga PHL yang Tersedia	Orang			18	550.500.000	18	557.671.200	18	557.671.200	18	1665842400

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

		2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	2.350.000	1	2.350.000	1	2.350.000	3	7.050.000	
		2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	1	2.350.000	1	2.350.000	1	2.350.000	3	7.050.000	
								Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah PAD yang dihasilkan Perangkat Daerah DIBAGI jumlah PAD keseluruhan DIKALI 100	%	100	100	100	100		100		100		
		2	1	0	2	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi PAD Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi PAD yang dilaksanakan DIBAGI jumlah layanan administrasi PAD yang dibutuhkan DIKALI 100	%			100	-	100	7.378.930	100	7.378.000	100	14.756.930
		2	1	0	2	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah yang terdata/terdaftar	Jenis	14	0	0	-	14	7.378.930	14	7.378.000	28	14.756.930	
								Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya DIBAGI jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya DIKALI 100	%	100	100	100	100		100		100		
		2	1	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Kepegawaian yang dianggarkan DIKALI 100	%			100	50.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	190.000.000
		2	1	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	orang	10	10	10	50.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	30	170.000.000	


Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

		2	1	0	2	1	Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	kali	100	0	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000
								Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	100	100		100		100	
		2	1	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	%			100	171.858.274	100	264.040.000	100	264.040.000	100	699.938.274
		2	1	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	11	11	9	4.990.424	5	5.000.000	5	5.000.000	19	14.990.424
		2	1	0	2	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	Unit	10	0	4	-	4	21.500.000	4	21.500.000	12	43.000.000
		2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	Jenis	0	0	51	23.527.850	51	22.230.000	51	22.230.000	51	67.987.850
		2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis/Lembar	7/42285	7/42285	12/45000	18.340.000	12/45000	15.310.000	12/45000	15.310.000	12/180000	48.960.000
		2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	kali	50	50	50	125.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	525.000.000
								Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan jumlah sarana dan prasana yang ada DIKALI 100	%	100	100	100	100		100		100	

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

		2	1	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase Terpenuhin ya Penyediaan Jasa	Jumlah layanan Jasa terpenuhi DIBAGI jumlah layanan Jasa yang dibutuhkan DIKALI 100	%		100	430.634.250	100	594.175.000	100	594.175.000	100	1.618.984.250	
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang terlayani		Orang	474	474	582	315.600.000	582	142.000.000	582	142.000.000	582	599.600.000
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		Unit	10	0	104	61.734.500	104	61.850.000	104	61.850.000	104	185.434.500
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHL Tenaga Kebersihan Kantor		orang/ bulan	1 Jasa	1 Jasa	2	53.299.750	2	390.325.000	2	390.325.000	2	833.949.750
		2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Presentase terepenuhin ya Pemeliharaan n Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik DIBAGI jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIKALI 100	%			100	483.080.600	100	724.615.600	100	724.615.600	100	1.932.311.800
		2	1	0	2	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peraorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		unit	0	0	0	-	9	307.535.000	9	307.535.000	9	615.070.000
		2	1	0	2	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		unit	9	9	85	283.080.600	169	367.080.600	169	367.080.600	169	1.017.241.800
		2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang dipelihara		unit	2 Paket	2 Paket	1	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	300.000.000

		2	1	0			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terlaksana DIBAGI Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup DIKALI 100	%		80	-	80	360.052.912	80	540.049.800	80	900.102.712	
		2	1	0	2		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota		Dokumen	0	0	0	-	1	182.249.800	1	182.249.800	2	364.499.600
		2	1	0	2	0	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab./Kota		Dokumen	0	0	0	-	1	132.249.800	1	132.249.800	2	264.499.600
		2	1	0	2	0	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang terpantau		Dokumen	0	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
		2	1	0	2	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Kali	0	0	1	-	1	177.803.112	1	357.800.000	3	535.603.112
		2	1	0	2	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS yang dibuat (KLHS Rencana Tata Ruang)		Dokumen	0	0	0	-	1	177.803.112	1	177.800.000	2	355.603.112
		2	1	0	2	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen KLHS yang dibuat (KLHS RPJPD/RPJMD)		Dokumen	1	1	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000
		2	1	0	2	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS yang dibuat (KLHS untuk KRP)		Dokumen	0	0	0	-	0	-	1	80.000.000	1	80.000.000

		2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kualitas air danau	Mempertahankan mutu kualitas air danau diwakili parameter BOD (mg/l)	mg/l	0	0	2	468.587.290	2	750.000.000	2	850.000.000	2	2.068.587.290
			1					Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Peningkatan mutu kualitas air diwakili parameter BOD (mg/l)	mg/l	0	0	5,54		4,27		3		3	
								Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi DIBAGI luas lahan kritis keseluruhan DIKALI 100	%	0	0	3		3		3		3	
		2	1	0	2		Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Terlaksananya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Dokumen			4	468.587.290	4	750.000.000	4	850.000.000	12	2.068.587.290
		2	1	0	2	0	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	Jumlah Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut		Jenis			4	468.587.290	0	-	0	-	4	468.587.290
								Persentase Jumlah Usaha dan/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran tanah, air, udara dan laut		Indeks	0	56,66	71,7		72,7	100.000.000	73,7	100.000.000	73,7	200.000.000
										Indeks	91,22	88,36	96,5		96,8		97,1		97,1	
										%	50	33,33	75		80		80		80	

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

		2	1	0	2	0	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Hasil Uji Laboratorium Lingkungan Hidup	Sertifikat	0	95%	0	0	275	500.000.000	275	500.000.000	550	1.000.000.000
		2	1	0	2	0	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tersedia	Dokumen	0	100%	0	-	1	150.000.000	1	250.000.000	2	400.000.000
		2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terbangun dan Terpeliharaan Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	%	0	0	21,2	3.803.664.628	21,3	4.919.543.721	21,3	5.939.891.200	21,3	14.663.099.549
		2	1	0	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Terpeliharaan seluruh aset RTH Kota Pangkalpinang	Wilayah	0	0	1	3.803.664.628	1	4.919.543.721	1	5.939.891.200	1	14.663.099.549
		2	1	0	2	0	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	0	0	0	-	1	83.643.000	1	83.643.000	2	167.286.000
		2	1	0	2	0	Pengelolaan Kebun Raya	Terlaksananya Pengelolaan Kebun Raya	kawasan	0	0	1	377.728.000	1	600.000.000	1	800.000.000	1	1.777.728.000
		2	1	0	2	0	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	%	0	0	21,2	3.425.936.628	21,3	4.195.900.721	21,3	5.016.248.200	21,3	12.638.085.549
		2	1	0	2	0	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	0	0	0	-	1	40.000.000	1	40.000.000	2	80.000.000

		2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan izin DIBAGI jumlah perusahaan yang mengajukan izin DIKALI 100	%		70	-	70	85.455.500	70	85.455.500	70	170.911.000	
		2	1	0	2		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terkumpulnya Data perusahaan Penghasil Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		Data	2 Doku men	0	1	-	1	85.455.500	1	85.455.500	1	170.911.000
		2	1	0	2	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perusahaan Penghasil Limbah B3		Perusahaan	10	0	10	-	10	39.057.000	10	39.057.000	10	78.114.000
		2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Provinsi		kali	0	0	0	-	1	46.398.500	1	46.398.500	2	92.797.000
		2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001		Perusahaan	0	0	0	-	1	56.053.442	1	56.054.000	2	112.107.442

		2	1	0	2		Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terbinanya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		0	0	4	-	4	56.053.442	4	56.054.000	12	112.107.442	
		2	1	0	2	0	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi Lingkungan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Lingkungan yang diterbitkan DIBAGI Jumlah Pengajuan Izin Lingkungan DIKALI 100	%	0	0	80	-	80	14.888.442	80	14.889.000	80	29.777.442
		2	1	0	2	0	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan pengawasan		Kali	0	0	45	-	45	41.165.000	45	41.165.000	45	82.330.000
		2	1	0			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Penghargaan	0	0	1	31.400.000	1	320.360.585	1	320.361.000	3	672.121.585
		2	1	0	2		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia		Dokumen	0	0	1	31.400.000	1	320.360.585	1	320.361.000	3	672.121.585

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

		2	1	0	2	0	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/Filant ropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyampaian Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Laporan	0	0	1	31.400.000	1	320.360.585	1	320.361.000	3	672.121.585
		2	1	1	1	0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan DIBAGI Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang terregistrasi DIKALI 100	%		80%	29.010.600	80%	29.050.000	80%	29.050.000	80%	87.110.600
		2	1	1	2	0	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Kasus	5	5	5	29.010.600	5	29.050.000	5	29.050.000	15	87.110.600
		2	1	1	2	0	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Kasus Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang dikelola	Kali	0	0	5	29.010.600	5	29.050.000	5	29.050.000	15	87.110.600
		2	1	1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	92,51	92,48	86,5	15.460.837.840	88	23.784.036.153	89,5	26.195.812.700	89,5	65.440.686.693
								Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	%	0	0	13,5		12		10,5		10,5	
		2	1	1	2	0	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	92,51	92,48	86,5	15.460.837.840	88	23.784.036.153	89,5	26.195.812.700	89,5	65.440.686.693

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

		2	1	1	2	0	Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah Pengelolaan Sampah Kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi daerah pengelolaan sampah kota	Laporan	0	0	1	48.108.000	1	55.758.000	1	55.758.000	3	159.624.000
		2	1	1	2	0	Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota	Jumlah volume Sampah yang tertangani	M ³	0	0	159,418	3.434.302.520	166,74	23.517.128.880	180,67	25.928.904.700	180,67	52.880.336.100
		2	1	1	2	0	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	kali	70 Orang	0	0	-	2	143.847.448	2	143.848.000	4	287.695.448
		2	1	1	2	0	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi	kali	0	0	12	11.978.427.320	12	25.000.000	12	25.000.000	36	12.028.427.320
		2	1	1	2	0	Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Tersusunnya Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Dokumen	0	0	1	-	1	41.301.825	1	41.302.000	3	82.603.825
		2	1	1	2	0	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota	Unit	3	30	0	-	1	1.000.000	1	1.000.000	2	2.000.000
													25.694.655.445		37.192.328.000		40.904.449.000		103.791.432.445

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2020

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				Tahun 2020					
													Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran		
		1						2	3			4	5	6	7	8	9	10	11			
Meningkatkan penanganan dan pengelolaan sampah									Presentase penanganan sampah perkotaan	%	86,5	80,5	70%	92,51%			75%	92,48%				
	Menurunkan volume sampah perkotaan								Presentase penanganan sampah perkotaan	%	76,3	80,5	60%	92,51%			65%	92,48%				
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan									Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	70	70	70	0			75	66,45				
	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan								Indeks Kualitas Air	Indeks	50	50	60	0			63	56,67				
									Indeks Kualitas Udara	Indeks	75	75	75	91,22			80	88,36				
									Indeks Tutupan Lahan	Indeks	0,1	0,1	0,2	42,75			0,3	42,75				
		2	05	2	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	Pelayanan	10	11	11 Pelayanan	11 Pelayanan	1.182.545.500	1.001.090.548	11 Pelayanan	11 Pelayanan	746.438.598	697.984.109	
		2	05	2	05	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik	Bulan	12	12	12 Bulan	12 Bulan	253.200.000	114.194.194	12 Bulan	12 Bulan	111.000.000	96.134.800	

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

		2	05	2	05	01	0	0	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	Bulan	12	12	12 Bulan	12 Bulan	142.275.000	132.625.000	12 Bulan	12 Bulan	153.350.000	151.275.000	
		2	05	2	05	01	0	1	8	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Jasa	1	1	1 Jasa	1 Jasa	32.728.500	32.278.500	1 Jasa	1 Jasa	27.000.000	26.720.000	
		2	05	2	05	01	0	1	9	Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	Unit, ruang kantor, dan kamar mandi	25	25	104 unit	104 unit	66.650.000	39.660.000	7 ruang kantor dan 5 kamar mandi	7 ruang kantor dan 5 kamar mandi	30.000.000	9.919.000	
		2	05	2	05	01	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis yang tersedia	Jenis	46	46	51 Jenis	51 Jenis	35.667.000	35.127.000	51 Jenis	51 Jenis	21.500.000	16.837.300	
		2	05	2	05	01	0	1	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan	Jenis, Lembar	2	2	7 Jenis, 42.285 Lembar	7 Jenis, 42.285 Lembar	25.000.000	22.938.700	7 Jenis, 42.285 Lembar	7 Jenis, 42.285 Lembar	9.705.000	9.239.100	
		2	05	2	05	01	0	1	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jenis, Paket	9	9	11 Jenis, 1 Paket	11 Jenis, 1 Paket	10.000.000	9.870.000	11 Jenis, 1 Paket	11 Jenis, 1 Paket	3.250.000	3.249.800	
		2	05	2	05	01	0	1	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	4	4	10 unit	10 unit	70.000.000	69.755.000	0	0	0	0	
		2	05	2	05	01	0	1	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	Bulan	0	0	12 bulan	12 bulan	13.500.000	13.500.000	12 bulan	12 bulan	7.140.000	7.140.000	
		2	05	2	05	01	0	1	8	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Orang	50	50	50 Orang	50 Orang	350.000.000	349.867.154	50 Orang	50 Orang	195.093.598	195.069.109	
		2	05	2	05	01	0	1	4	Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran	Jumlah jasa penunjang administrasi perkantoran yang tersedia	Orang	8	8	8 orang	8 orang	183.525.000	181.275.000	8 orang	8 orang	188.400.000	182.400.000	
		2	05	2	05	02	1	0		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Upaya	0	0	3 upaya	3 upaya	724.360.750	655.281.650	3 upaya	3 upaya	353.681.500	253.541.660	
		2	05	2	05	02	1	0		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Paket	0	0	1 paket	1 paket	25.000.000	21.872.000	1 paket	1 paket	30.000.000	19.250.000	
		2	05	2	05	02	2			Pemeliharaan rutin/ berkala	Jumlah pemeliharaan	Paket	0	1	2	2	314.989.550	310.034.000	2 Paket	2 Paket	25.000.000	24.917.500	

						2		gedung Kantor	gedung kantor			Paket	Paket							
		2	05	2	05	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	8	8	9 unit	9 unit	309.371.200	250.789.650	9 unit	9 unit	298.681.500	209.374.160
		2	05	2	05	02	80	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Bank Sampah	Jumlah Peningkatan sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Bank Sampah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	05	2	05	02	136	Pemeliharaan Rumah Penjaga Kantor	Jumlah pemeliharaan rumah penjaga kantor	Paket	0	0	1 paket	1 paket	75.000.000	72.586.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah upaya peningkatan disiplin aparatur	Upaya	1	1	1 Upaya	1 Upaya	50.000.000	43.500.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	03	02	Pengeadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya	Stel	0	0	97 Stel	97 Stel	50.000.000	43.500.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	05		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah Upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Upaya	0	0	1 Upaya	1 Upaya	50.000.000	49.796.721	1 Upaya	1 Upaya	34.694.400	18.549.400
		2	05	2	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai/ASN yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	Orang	10	10	10 orang	10 orang	50.000.000	49.796.721	10 orang	10 orang	4.694.400	4.694.400
		2	05	2	05	05	97	Sosialisasi Penyuluhan Narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi Penyuluhan Narkoba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	05	2	05	05	98	Peningkatan dan Pendataan Objek Retribusi Persampahan	Jumlah Objek Retribusi Persampahan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	05	2	05	05	99	Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah jenis tanda bukti retribusi yang dicetak		0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	13.855.000

		2	0	2	0	0			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Upaya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Upaya	5	5	6 Upaya	6 Upaya	18.900.000	17.749.450	6 Upaya	6 Upaya	12.900.000	11.911.850
		2	05	2	05	01	0	0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja (LAKIP)	laporan	1	1	1 Laporan	1 Laporan	3.150.000	3.150.000	1 Laporan	1 Laporan	2.350.000	2.311.500
		2	05	2	05	01	0	0	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	1	1	1 Laporan	1 Laporan	3.150.000	3.149.850	1 Laporan	1 Laporan	2.350.000	2.339.350
		2	05	2	05	01	0	0	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	1	1 Laporan	1 Laporan	3.150.000	3.150.000	1 Laporan	1 Laporan	2.350.000	2.340.200
		2	05	2	05	01	0	0	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yang tersedia	laporan	1	1	1 Laporan	1 Laporan	3.150.000	3.150.000	1 Laporan	1 Laporan	2.350.000	2.296.250
		2	05	2	05	01	0	0	Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah laporan SPM	laporan	1	1	1 Laporan	1 Laporan	3.150.000	1.999.600	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	2.624.550
		2	05	2	05	01	0	0	Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Profil Dinas Lingkungan Hidup	laporan	0	0	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	0	2	Forum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang tersedia	laporan	0	0	1 Laporan	1 Laporan	3.150.000	3.150.000	0	0	-	-
		2	05	2	05	01	0	2	Sistem Pengendalian intern Pemerintahan			0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		2	05	2	05	01			Program peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	Jumlah Upaya Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	Upaya	1	1	1 Upaya	1 Upaya	28.200.000	25.952.000	1 Upaya	1 Upaya	0	0
		2	05	2	05	01	8		Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah jenis tanda bukti retribusi yang dicetak	Jenis	5	5	5 Jenis	5 Jenis	28.200.000	25.952.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	1	5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	Jumlah upaya pengembangan kinerja pengelolaan	Upaya	12	8	15 Upaya	15 Upaya	19.186.113.937	16.321.493.126	0	0	0	0

									Persampahan	persampahan			a	a							
		2	05	2	05	01	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Unit	10	10	3 Unit	3 Unit	638.048.587	310.000.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	15	04	Peningkatan operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang mendapatkan peningkatan operasi dan pemeliharaan	Unit	85	85	85 Unit	85 Unit	12.897.021.200	12.256.461.730	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	15	12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan	1	1	1 Laporan	1 Laporan	5.825.000	1.575.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	15	14	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan (Operasional TPA)	Jumlah TPA yang mendapatkan pemeliharaan	Kali	1	1	1 kali	1 kali	98.652.000	86.787.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	15	15	Pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar	Jumlah pelaksanaan pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar	Kali	4	4	4 kali	4 kali	30.756.000	30.752.500	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	15	16	Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil	Jumlah TPA yang beroperasi	Unit	1	1	1 unit	1 unit	3.751.972.350	2.610.135.410	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	15	31	Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang mendapatkan rehabilitasi	Unit	0	0	7 unit	7 unit	575.839.600	488.947.900	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	15	32	Pemeliharaan kebersihan perumahan tampuk pinang pura	Jumlah waktu pemeliharaan kebersihan perumahan tampuk pinang pura	Bulan	12	12	12 bulan	12 bulan	96.754.000	83.225.700	0	0	0	0

		2	05	2	05	01	153	3	Kerjasama penanganan kebersihan kota	Jumlah pelaksanaan kerjasama penanganan kebersihan kota	Kali	2	0	2 kali	2 kali	50.000.000	41.740.500	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	154	3	Sosialisasi pemilihan dan pengolahan sampah masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi	Orang	50	0	100 orang	100 orang	48.882.880	42.195.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	157	3	Sosialisasi sadar Reduce Reuse Recycle 3R bagi Siswa/siswi	jumlah siswa/I peserta sosialisasi	Orang	100	0	100 orang	100 orang	43.647.120	38.275.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	152	4	Pemeliharaan kebersihan perumahan RUSUNAWA	Jumlah waktu pemeliharaan kebersihan perumahan RUSUNAWA	Bulan	12	12	12 bulan	12 bulan	90.993.200	82.730.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	156	5	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	jumlah masyarakat yang melakukan pengolahan Persampahan	Orang	70	0	70 orang	70 orang	50.000.000	41.200.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	157	5	Pengadaan Alat Angkut Dump Truck	Jumlah alat angkut dump truck	Unit	0	0	1 unit	1 unit	426.479.000	-	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	158	5	Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	Jumlah pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	Unit	0	0	6 unit	6 unit	381.243.000	207.467.386	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya pengendalian dan perusakan lingkungan hidup	Upaya	9	11	17 upaya	17 upaya	1.372.596.000	1.113.052.097	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	161	0	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian kota sehat/ adipura	Kali	4	4	4 kali	4 kali	87.830.000	62.697.738	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	163	0	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah sampel air lingkungan yang mendapat pemantauan kualitas	Sampel	225	225	225 sampel	225 sampel	403.264.000	397.165.213	0	0	0	0

									lingkungan												
		2	05	2	05	01	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha yang diawasi	Perusahaan	44	44	45 perusahaan	45 perusahaan	50.000.000	40.024.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	16	11	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah Bank sampah yang dibentuk	Bank Smpah	0	0	2 bank sampah	2 bank sampah	40.000.000	39.651.300	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	16	19	Pengadaan alat pemantau kualitas lingkungan	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan	Paket	0	1	1 paket	1 paket	90.059.000	89.412.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	16	33	Pembinaan Program Adiwiyata	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pembinaan	Sekolah	0	0	10 Sekolah	10 Sekolah	50.000.000	36.490.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	16	37	Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	Jumlah kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	Kasus	0	0	5 kasus	5 kasus	100.865.000	83.968.485	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	16	38	Akreditasi laboratorium	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	Kali survailen	1	1	1 kali survailen II	1 kali survailen II	25.000.000	19.082.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	16	40	Sosialisasi sumber pencemaran yang berasal dari industri	Jumlah peserta Sosialisasi	Orang	0	0	50 orang	50 orang	50.000.000	20.644.000	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	16	41	Koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup	Jumlah Koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup	Kali	100	100	100 kali	100 kali	75.000.000	72.610.257	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	16	44	Penyelenggaraan Sekretariat komisi AMDAL	Jumlah dokumen Amdal yang dapat diselesaikan	Dokumen	2	2	2 dokumen	2 dokumen	101.958.000	93.178.173	0	0	0	0
		2	05	2	05	01	16	45	Akselerasi Laboratorium	Jumlah peserta akselerasi	Orang	18	18	18 Orang	18 Orang	14.305.000	13.212.800	0	0	0	0

		2	05	2	05	01	16	48	sosialisasi peraturan perundangan	Jumlah peserta Sosialisasi	Orang	70	70	100 orang	100 orang	70.000.000	43.415.250	0	0	0	0		
		2	05	2	05	01	16	50	Pengawasan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang diawasi dalam pengolahan Limbah B3	Perusahaan	0	0	10 perusahaan	10 perusahaan	38.115.000	29.844.900	0	0	0	0		
		2	05	2	05	01	16	51	Pendataan dan pemetaan penghasil Limbah B3	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pemetaan penghasil Limbah B3	Dokumen	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	0	0	0	0	0		
		2	05	2	05	01	16	53	Pembinaan terhadap sumber pencemaran pada institusi dan non institusi	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan terhadap sumber pencemaran pada institusi dan non institusi	Perusahaan	0	0	20 perusahaan	20 perusahaan	46.200.000	25.241.353	0	0	0	0		
		2	05	2	05	01	16	54	Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan lingkungan hidup	Dokumen	0	1	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	29.759.628	0	0	0	0		
		2	05	2	05	01	16	57	Sosialisasi dampak kerusakan lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	0	0	70 orang	70 orang	50.000.000	16.655.000	0	0	0	0		
		2	05	2	05	01	16	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Upaya	2	3	5 upaya	5 upaya	632.000.000	449.820.798	0	0	0	0		
		2	05	2	05	01	17	22	Pemantauan Bahan perusak ozone	Jumlah pemantauan bahan perusak ozone	Pelaku Usaha	20	20	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	40.000.000	34.133.600	0	0	0	0		
		2	05	2	05	01	17	34	Program Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibentuk	Kampung	1	1	1 kampung	1 kampung	42.000.000	36.734.400	0	0	0	0		
		2	05	2	05	01	17	47	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen IKPLHD yang tersedia	Dokumen	0	1	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	73.480.714	0	0	0	0		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2023

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPJMD
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	4	5	7	12	13	14	15
1	Tujuan RPJMD : peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,44	62,97	63,49	63,49
2	Sasaran RPJMD : meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,72	88,82	88,93	88,93
			Indeks Kualitas Air	Indeks	50,93	51,03	51,13	51,13
			Indeks Tututupan Lahan	Indeks	33,62	35,65	37,68	37,68
3	Tujuan: meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	103,99	102,54	101,14	101,14
4	Sasaran: meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan		Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	%	86,5	88	89,5	89,5
5			Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	15,87	22,93	30	30
6			Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	%	21,31	21,32	21,33	21,33
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			%	100	100	100	100
8			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100

10	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	%	100	100	100	100
11	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100
12			Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	%	100	100	100	100
13	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi PAD Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
14			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	%	100	100	100	100
15	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100	100	100	100
16			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100
17	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	%	100	100	100	100
18			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	%	100	100	100	100

20	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100
21	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terpenuhinya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	%	80	80	80	80
22	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Terpenuhinya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Dokumen	0	1	1	2
23	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kali	1	1	1	3
24	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air danau	mg/l	2	2	2	2
			Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	mg/l	5,54	4,27	3	3
			Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	%	3	3	3	3
25	Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	4	4	4	12
26	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota	%	21,2	21,3	21,3	21,3
27	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terpeliharanya seluruh aset RTH Kota	Wilayah	1	1	1	1

28	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	%	70	70	70	70
29	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkumpulnya Data Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkumpulnya Data perusahaan Penghasil Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Data	1	1	1	1
30	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Perusahaan	0	1	1	2
31	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kali	4	4	4	12
32	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penghargaan	1	1	1	3
33	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia	Dokumen	1	1	1	3

		Hidup yang tersedia						
34	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	80	80	80	80
35	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kasus	5	5	5	15
36	Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	86,5	88	89,5	89,5
			Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	%	13,5	12	10,5	10,5
37	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	86,5	88	89,5	89,5
38	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	%	0,1	0,2	0,2	0,2

Tabel 7.2
Realisasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2020

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020	
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan sampah		Presentase penanganan sampah perkotaan	%	70%	92,51%	75%	92,48%
2	Menurunya volume sampah perkotaan		Presentase penanganan sampah perkotaan	%	60%	92,51%	65%	92,48%
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	70	0	75	66,45
4	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan		Indeks Kualitas Air	Indeks	60	0	63	56,67
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	75	91,22	80	88,36
			Indeks Tutupan Lahan	Indeks	0,2	42,75	0,3	42,75
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	Pelayanan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	11 Pelayanan	11 Pelayanan
6	Penyediaan jasa komunikasi,	Tersedianya jasa komunikasi,	Jumlah waktu penyediaan ja-sa	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

	sumber daya air dan listrik	sumber daya air dan listrik	komunikasi dan listrik					
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
8	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Jasa	1 Jasa	1 Jasa	1 Jasa	1 Jasa
9	Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	Unit, ruang kantor, dan kamar mandi	104 unit	104 unit	7 ruang kantor dan 5 kamar mandi	7 ruang kantor dan 5 kamar mandi
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis yang tersedia	Jenis	51 Jenis	51 Jenis	51 Jenis	51 Jenis
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan jumlah penggandaan	Jenis, Lembar	7 Jenis, 42.285 Lembar	7 Jenis, 42.285 Lembar	7 Jenis, 42.285 Lembar	7 Jenis, 42.285 Lembar
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jenis, Paket	11 Jenis, 1 Paket	11 Jenis, 1 Paket	11 Jenis, 1 Paket	11 Jenis, 1 Paket
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	10 unit	10 unit	0	0
14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan	Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

			minuman					
15	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
16	Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran	Tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	Jumlah jasa penunjang administrasi perkantoran yang tersedia	Orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Upaya	3 upaya	3 upaya	3 upaya	3 upaya
18	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
19	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit
21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Bank Sampah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Jumlah Peningkatan sarana dan		0	0	0	0

		Bangunan Gedung Bank Sampah	Prasarana Bangunan Gedung Bank Sampah					
22	Pemeliharaan Rumah Penjaga Kantor	Terpeliharanya Rumah Penjaga Kantor	Jumlah pemeliharaan rumah penjaga kantor	Paket	1 paket	1 paket	0	0
23	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Jumlah upaya peningkatan disiplin aparatur	Upaya	1 Upaya	1 Upaya	0	0
24	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Stel	97 Stel	97 Stel	0	0
25	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah Upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Upaya	1 Upaya	1 Upaya	1 Upaya	1 Upaya
26	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai/ASN yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	Orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
27	Sosialisasi Penyuluhan Narkoba	Terselenggaranya Sosialisasi Penyuluhan	Jumlah Peserta Sosialisasi Penyuluhan		0	0	0	0

		Narkoba	Narkoba					
28	Peningkatan dan Pendataan Objek Retribusi Persampahan	Terlaksananya Peningkatan dan Pendataan Objek Retribusi Persampahan	Jumlah Objek Retribusi Persampahan		0	0	0	0
29	Peningkatan Penerimaan PAD	Meningkatnya Penerimaan PAD	Jumlah jenis tanda bukti retribusi yang dicetak		0	0	0	0
30	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Upaya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Upaya	6 Upaya	6 Upaya	6 Upaya	6 Upaya
31	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja (LAKIP)	laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
32	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
33	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

34	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Tersusunnya RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yang tersedia	laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
35	Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal	Tersusunnya laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah laporan SPM	laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
36	Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup	Tersusunnya Profil Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Profil Dinas Lingkungan Hidup	laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0
37	Forum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Forum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang tersedia	laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0
38	Sistem Pengendalian intern Pemerintahan	Terlaksananya Sistem Pengendalian intern Pemerintahan			0	0	0	0
39	Program peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	Meningkatnya PAD dan Pendapatan Lainnya	Jumlah Upaya Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	Upaya	1 Upaya	1 Upaya	1 Upaya	1 Upaya
40	Peningkatan Penerimaan PAD	Meningkatnya Penerimaan PAD	Jumlah jenis tanda bukti retribusi yang dicetak	Jenis	5 Jenis	5 Jenis	0	0

41	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah upaya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Upaya	15 Upaya	15 Upaya	0	0
42	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Unit	3 Unit	3 Unit	0	0
43	Peningkatan operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang mendapatkan peningkatan operasi dan pemeliharaan	Unit	85 Unit	85 Unit	0	0
44	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0
45	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan (Operasional TPA)	Terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan (Operasional TPA)	Jumlah TPA yang mendapatkan pemeliharaan	Kali	1 kali	1 kali	0	0
46	Pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar	Terlaksananya Pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar	Jumlah pelaksanaan pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar	Kali	4 kali	4 kali	0	0

47	Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil	Terpenuhinya Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil	Jumlah TPA yang beroperasi	Unit	1 unit	1 unit	0	0
48	Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan	Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang mendapatkan rehabilitasi	Unit	7 unit	7 unit	0	0
49	Pemeliharaan kebersihan perumahan tampuk pinang pura	Terpeliharanya kebersihan perumahan tampuk pinang pura	Jumlah waktu pemeliharaan kebersihan perumahan tampuk pinang pura	Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0
50	Kerjasama penanganan kebersihan kota	Terlaksananya Kerjasama penanganan kebersihan kota	Jumlah pelaksanaan kerjasama penanganan kebersihan kota	Kali	2 kali	2 kali	0	0
51	Sosialisasi pemilihan dan pengolahan sampah masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi pemilihan dan pengolahan sampah masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi	Orang	100 orang	100 orang	0	0
52	Sosialisasi sadar Reduce Reuse Recycle 3R bagi Siswa/siswi	Terlaksananya Sosialisasi sadar Reduce Reuse Recycle 3R bagi Siswa/siswi	jumlah siswa/I peserta sosialisasi	Orang	100 orang	100 orang	0	0
53	Pemeliharaan kebersihan perumahan RUSUNAWA	Terpeliharanya kebersihan	Jumlah waktu pemeliharaan	Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0

		perumahan RUSUNAWA	kebersihan perumahan RUSUNAWA					
54	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	jumlah masyarakat yang melakukan pengolahan Persampahan	Orang	70 orang	70 orang	0	0
55	Pengadaan Alat Angkut Dump Truck	Terlaksananya Pengadaan Alat Angkut Dump Truck	Jumlah alat angkut dump truck	Unit	1 unit	1 unit	0	0
56	Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	Terlaksananya Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	Jumlah pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	Unit	6 unit	6 unit	0	0
57	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Upaya	17 upaya	17 upaya	0	0
58	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Terlaksananya Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian kota sehat/ adipura	Kali	4 kali	4 kali	0	0
59	Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah sampel air lingkungan yang mendapat pemantauan kualitas lingkungan	Sampel	225 sampel	225 sampel	0	0

60	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha yang diawasi	Perusahaan	45 perusahaan	45 perusahaan	0	0
61	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Terlaksananya Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah Bank sampah yang dibentuk	Bank Smpah	2 bank sampah	2 bank sampah	0	0
62	Pengadaan alat pemantau kualitas lingkungan	Terlaksananya Pengadaan alat pemantau kualitas lingkungan	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan	Paket	1 paket	1 paket	0	0
63	Pembinaan Program Adiwiyata	Terlaksananya Pembinaan Program Adiwiyata	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan	Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	0	0
64	Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	Jumlah kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	Kasus	5 kasus	5 kasus	0	0
65	Akreditasi laboratorium	Terlaksananya Akreditasi laboratorium	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	Kali survailen	1 kali survailen II	1 kali survailen II	0	0
66	Sosialisasi sumber pencemaran yang berasal dari industri	Terlaksananya Sosialisasi sumber pencemaran yang berasal dari industri	Jumlah peserta Sosialisasi	Orang	50 orang	50 orang	0	0

67	Koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup	Terlaksananya Koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup	Jumlah Koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup	Kali	100 kali	100 kali	0	0
68	Penyelenggaraan Sekretariat komisi AMDAL	Terselenggaranya Sekretariat komisi AMDAL	Jumlah dokumen Amdal yang dapat diselesaikan	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0
69	Akselerasi Laboratorium	Terlaksananya Akselerasi Laboratorium	Jumlah peserta akselerasi	Orang	18 Orang	18 Orang	0	0
70	sosialisasi peraturan perundangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan	Jumlah peserta Sosialisasi	Orang	100 orang	100 orang	0	0
71	Pengawasan Limbah B3	Terlaksananya Pengawasan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang diawasi dalam pengolahan Limbah B3	Perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	0	0
72	Pendataan dan pemetaan penghasil Limbah B3	Terlaksananya Pendataan dan pemetaan penghasil Limbah B3	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pemetaan penghasil Limbah B3	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0
73	Pembinaan terhadap sumber pencemaran pada institusi dan non institusi	Terlaksananya Pembinaan terhadap sumber pencemaran pada institusi dan non institusi	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan terhadap sumber pencemaran pada institusi dan non institusi	Perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	0	0

74	Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan lingkungan hidup	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0
75	Sosialisasi dampak kerusakan lingkungan	Terlaksananya Sosialisasi dampak kerusakan lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	70 orang	70 orang	0	0
76	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Upaya	5 upaya	5 upaya	0	0
77	Pemantauan Bahan perusak ozone	Terpantaunya Bahan perusak ozone	Jumlah pemantauan bahan perusak ozone	Pelaku Usaha	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	0	0
78	Program Kampung Iklim	Terlaksananya Program Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibentuk	Kampung	1 kampung	1 kampung	0	0
79	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen IKPLHD yang tersedia	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0
80	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen DDDT yang tersedia	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0

81	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen KLHS yang tersedia	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0
82	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah upaya rehabilitasi hutan dan lahan	Upaya	2 upaya	2 upaya	0	0
83	Peningkatan Sarana dan Prasarana sumber daya alam	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana sumber daya alam	Jumlah sarana dan prasarana sumber daya alam yang tersedia	Unit	2 unit	2 unit	0	0
84	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah sumber daya alam yang mendapat pengendalian dan pengawasan	ha	101 ha	101 ha	0	0
85	Pelayanan UPTD Laboratorium lingkungan	Terlaksananya Pelayanan UPTD Laboratorium lingkungan			0	0	0	0
86	Pengambilan sampel udara	Terlaksananya Pengambilan sampel udara			0	0	0	0
87	Pengelolaan dan pengolahan data hasil uji kualitas air dan udara	Terlaksananya Pengelolaan dan pengolahan data hasil uji kualitas			0	0	0	0

		air dan udara						
88	Program Pengendalian Persampahan	Terlaksananya Pengendalian Persampahan	Presentase Penanganan sampah Perkotaan		0	0	0	0
					0	0	0	0
			Presentase sampah yang terangkut ke TPA		0	0	0	0
					0	0	0	0
			Presentase sampah terkelola dengan metode 3R		0	0	0	0
					0	0	0	0
89	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Unit	0	0	30 Unit	30 Unit
90	Peningkatan operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya Peningkatan operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang mendapatkan peningkatan operasi dan pemeliharaan	%	0	0	90%	90%
91	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan		0	0	0	0

		pelaporan	pelaporan					
92	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan (Operasional TPA)	Terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan (Operasional TPA)	Jumlah waktu pemeliharaan TPA		0	0	0	0
93	Pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar	Terlaksananya Pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar	Jumlah pelaksanaan pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar		0	0	0	0
94	Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil	Terpenuhinya Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil	Jumlah TPA yang beroperasi	Kawasan	0	0	1 kawasan	1 kawasan
95	Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan	Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang mendapatkan rehabilitasi	Unit	0	0	26 Unit	26 Unit
96	Pemeliharaan kebersihan perumahan Tampuk Pinang Pura	Terpeliharanya kebersihan perumahan Tampuk Pinang Pura	Jumlah waktu pemeliharaan kebersihan perumahan Tampuk Pinang Pura		0	0	0	0
97	Kerjasama penanganan kebersihan kota	Terlaksananya Kerjasama penanganan	Jumlah pelaksanaan kerjasama	Kali	0	0	8 Kali	8 Kali

		kebersihan kota	penanganan kebersihan kota					
98	Sosialisasi pemilihan dan pengolahan sampah masyarakat (PKK Kelurahan)	Terlaksananya Sosialisasi pemilihan dan pengolahan sampah masyarakat (PKK Kelurahan)	Jumlah peserta Sosialisasi		0	0	0	0
99	Sosialisasi sadar Reduce Reuse Recycle 3R bagi Siswa/siswi	Terlaksananya Sosialisasi sadar Reduce Reuse Recycle 3R bagi Siswa/siswi	jumlah siswa/I peserta sosialisasi		0	0	0	0
100	Pemeliharaan kebersihan perumahan RUSUNAWA	Terpeliharanya kebersihan perumahan RUSUNAWA	Jumlah waktu pemeliharaan kebersihan perumahan RUSUNAWA		0	0	0	0
101	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (PKK Kota)	Terlaksananya Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (PKK Kota)	jumlah masyarakat yang melakukan pengolahan Persampahan		0	0	0	
102	Penyusunan data persampahan	Tersusunnya data persampahan	Jumlah laporan		0	0	0	0
103	Sosialisasi pengurangan sampah plastik dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga (Masyarakat Perumahan)	Terlaksananya Sosialisasi pengurangan sampah plastik dan pemanfaatan kembali sampah	Jumlah peserta sosialisasi		0	0	0	0

		rumah tangga (Masyarakat Perumahan)						
104	Pengadaan Mobil Arm Roll	Tersedianya Mobil Arm Roll	Jumlah Mobil Arm Roll		0	0	0	0
105	Pengadaan Mobil Compactor	Tersedianya Mobil Compactor	Jumlah Mobil Compactor		0	0	0	0
106	Pengadaan mobil pick up	Tersedianya mobil pick up	Jumlah mobil pick up		0	0	0	0
107	Pengadaan Excavator/PC Mini	Tersedianya Excavator/PC Mini	Jumlah excavator/PC mini		0	0	0	0
108	Penyusunan review DED TPA	Tersusunnya review DED TPA	Jumlah Dokumen review DED TPA	Dokumen	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen
109	Penataan TPA	Tertatanya TPA	Jumlah pembangunan	Kawasan	0	0	1 Kawasan	1 Kawasan
110	Pembangunan TPS 3R	Terlaksananya Pembangunan TPS 3R	Jumlah TPS 3R yang dibangun	KSM	0	0	2 KSM	2 KSM
111	Review DED Pembangunan TPST	Terpenuhinya Review DED Pembangunan TPST			0	0	0	0
112	Pembangunan TPST	Terlaksananya Pembangunan TPST			0	0	0	0
113	Pembentukan kelompok bank sampah di masyarakat	Terbentuknya kelompok bank sampah di	jumlah kelompok bank sampah		0	0	0	0

		masyarakat	yang terbentuk					
114	Penyusunan SOP persampahan	Tersusunnya SOP persampahan	Jumlah dokumen SOP		0	0	0	0
115	Pengadaan Rumah Kompos	Tersedianya Rumah Kompos	Jumlah pengadaan rumah kompos yang dibangun		0	0	0	0
116	Pengadaan Mobil Dump Truck	Tersedianya Mobil Dump Truck	Jumlah mobil dump truck yang dibeli		0	0	0	0
117	Pembangunan Pagar TPA	Terlaksananya Pembangunan Pagar TPA	Jumlah pembangunan pagar TPA yang dibangun		0	0	0	0
118	Pembangunan Drainase TPA	Pembangunan Drainase TPA	Jumlah pembangunan drainase TPA yang dibangun		0	0	0	0
119	Pembangunan Jalan Sel TPA	Terlaksananya Pembangunan Jalan Sel TPA	Jumlah pembangunan jalan sel yang dibangun		0	0	0	0
120	Pembangunan Sumur Lindi TPA	Terlaksananya Pembangunan Sumur Lindi TPA	Jumlah pembangunan sumur lindi yang dibangun		0	0	0	0
121	Pengadaan Motor Roda Tiga	Tersedianya Motor Roda Tiga	Jumlah pengadaan Motor Roda Tiga yang dibeli		0	0	0	0

					0	0	0	0
122	Program Penataan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penataan Lingkungan Hidup	Presentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan		0	0	0	0
					0	0	0	0
			Indeks Kualitas Air		0	0	0	0
			Indeks Kualitas Udara		0	0	0	0
			Indeks Tutupan Lahan		0	0	0	0
					0	0	0	0
			Peresentase peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan		0	0	0	0
					0	0	0	0
			Nilai untuk mencapai Adipura		0	0	0	0
123	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Terlaksananya Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian kota sehat/ adipura	Kali	0	0	4 Kali	4 Kali

124	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Usaha/Kegiatan	0	0	45 Usaha/ Kegiatan	45 Usaha/ Kegiatan
125	Pengendalian & Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengendalian & Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terpeliharanya aset sumber daya alam	Paket	0	0	1 Paket	1 Paket
126	Pemantauan Bahan perusak ozone	Terpantaunya Bahan perusak ozone	Jumlah pemantauan bahan perusak ozone	Pelaku Usaha	0	0	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha
127	Pembinaan Program Adiwiyata	Terlaksananya Pembinaan Program Adiwiyata	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan	Sekolah	0	0	10 Sekolah	10 Sekolah
128	Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kasus	0	0	5 Kasus	5 Kasus
					0	0	0	0
					0	0	0	0
129	Akreditasi laboratorium	Terlaksananya Akreditasi laboratorium	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	%	0	0	80%	80%
130	Penyelenggaraan Sekretariat komisi AMDAL	Terselenggaranya Sekretariat komisi	Jumlah kegiatan/usaha yang melenkapi	Dokumen	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen

		AMDAL	dokumen Amdal					
131	Akselerasi Laboratorium	Terlaksananya Akselerasi Laboratorium	Jumlah peserta kompetensi analisis laboratorium	%	0	0	80%	80%
132	Penyusunan Do-kumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)	Dokumen	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen
133	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	Dokumen	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen
134	Pengawasan Limbah B3	Terlaksananya Pengawasan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang diawasi dalam pengolahan Limbah B3	Perusahaan	0	0	10 Perusahaan	10 Perusahaan
135	Pendataan dan pemetaan penghasil limbah B3	Terlaksananya Pendataan dan pemetaan penghasil limbah B3	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pemetaan penghasil limbah B3	Dokumen	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen
136	Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan lingkungan hidup	%	0	0	75%	75%
137	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai	%	0	0	75%	75%

		kualitas lingkungan	dengan standar akreditasi					
138	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan	Terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan	Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan	%	0	0	80%	80%
139	Pengelolaan laboratorium lingkungan	Terkelolanya laboratorium lingkungan	Tersedianya data kualitas air dan udara lingkungan di Kota Pangkalpinang	%	0	0	75%	75%
140	Kaji ulang dokumen laboratorium	Terlaksananya Kaji ulang dokumen laboratorium	Tersusunnya hasil kaji ulang dokumen laboratorium mutu	%	0	0	75%	75%
141	Kaji banding laboratorium terakreditasi	Terlaksananya Kaji banding laboratorium terakreditasi	Tercapainya hasil kaji banding dengan laboratorium yang terakreditasi	%	0	0	80%	80%
142	Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup	Kali	0	0	100 Kali	100 Kali
143	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Teridentifikasinya GRK dan profil emisi GRK	%	0	0	100%	100%

144	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Teridentifikasinya potensi kerusakan tanah untuk produksi bio-massa dalam bentuk peta status kerusakan tanah / lahan untuk produksi bio-massa dan sebagai bahan penetapan kebijakan status kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa	Buku	0	0	1 Buku	1 Buku
145	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber pencemaran institusi dan non institusi	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber pencemaran institusi dan non institusi	terpantaunya hasil evaluasi rekomendasi sumber pencemaran institusi dan non institusi	Data	0	0	1 Data	1 Data
146	Inventarisasi data base ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Pangkalpinang	Terlaksananya Inventarisasi data base ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Pangkalpinang	Terhimpunnya data ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Pangkalpinang	Data	0	0	1 Data	1 Data
147	Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan	Dokumen	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen

		Lingkungan Hidup (RPPLH)	Lingkungan Hidup (RPPLH)					
148	Pelayanan UPTD Laboratorium lingkungan	Terlaksananya Pelayanan UPTD Laboratorium lingkungan	Terpantaunya kualitas lingkungan berdasarkan status mutu	%	0	0	95%	95%
149	Pengambilan sampling udara	Terlaksananya Pengambilan sampling udara	Terpantaunya udara ambien di titik lokasi tertentu (Transportasi, Pemukiman, Industri dan Perkantoran)	%	0	0	75%	75%
150	Pengelolaan dan pengolahan data hasil uji kualitas air dan udara	Terlaksananya Pengelolaan dan pengolahan data hasil uji kualitas air dan udara	teridentifikasinya indeks kualitas air (IKA) dan udara (IKU)	Data	0	0	1 Data	1 Data

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.